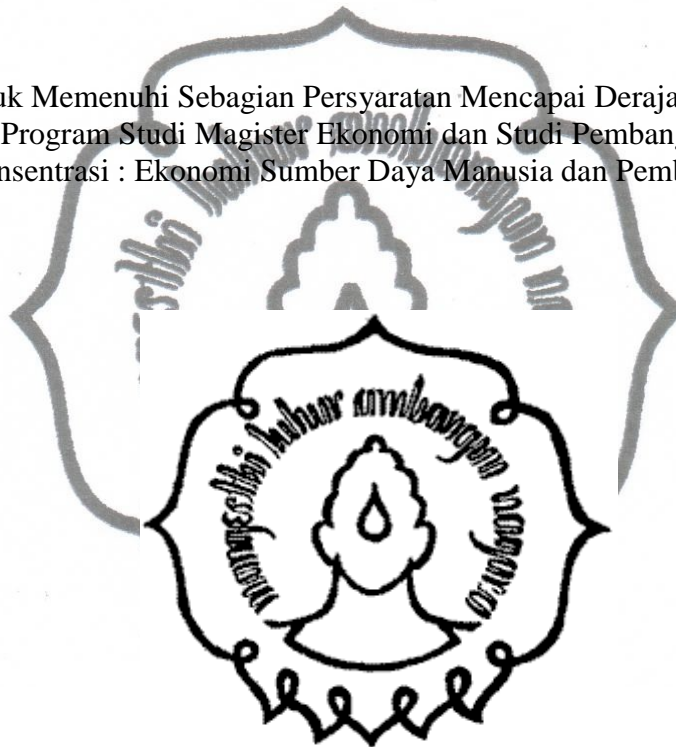


**ANALISIS DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
TERHADAP PEREKONOMIAN ANGGOTA SIMPAN
PINJAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
DI KECAMATAN TANGEN KABUPATEN
SRAGEN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan



Oleh :

**RIZKA DIAN RACHMAWATI
S4210090**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA
2011**

Halaman Persetujuan Pembimbing

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
TERHADAP PEREKONOMIAN ANGGOTA SIMPAN
PINJAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
DI KECAMATAN TANGEN KABUPATEN
SRAGEN**

Disusun oleh:

**RIZKA DIAN RACHMAWATI
S4210090**

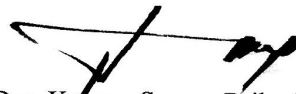
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II

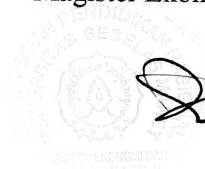


Dr. Agustinus Suryantoro, M.S
NIP.19590911 198702 1 001



Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si
NIP. 19560118 198601 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. J.J. Sarungu, M.S.
NIP. 19510701 198010 1 001

commit to user

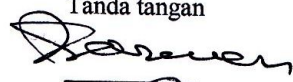


Halaman Persetujuan Penguji

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
TERHADAP PEREKONOMIAN ANGGOTA SIMPAN
PINJAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
DI KECAMATAN TANGEN KABUPATEN
SRAGEN**

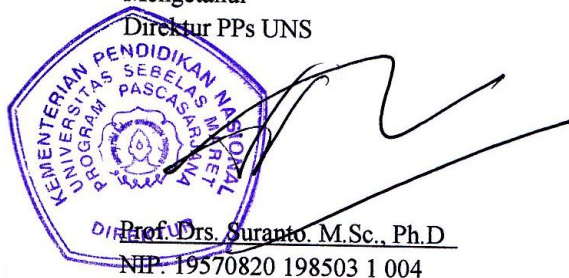
Disusun Oleh:
RIZKA DIAN RACHMAWATI
S4210090

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

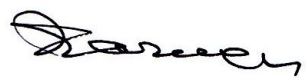
Pada tanggal : 18 Agustus 2011

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. J.J. Sarungu, M.S.	
Pembimbing Utama	Dr. Agustinus Suryantoro, M.S.	
Pembimbing Pendamping	Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si	

Mengetahui
Direktur PPs UNS


Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D
NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan


Dr. J.J. Sarungu, M.S.
NIP. 19510701 198010 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIZKA DIAN RACHMAWATI

NIM : S4210090

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Surakarta, 18 Agustus 2011

Tertanda,



RIZKA DIAN RACHMAWATI

MOTTO

Ilmu adalah senjata, sabar adalah pakaian, yakin adalah kekuatan, kejujuran adalah penolong, taat adalah kecintaan, kebahagiaan adalah sholatku.

Percayalah Allah akan selalu disisi kita dalam keadaan susah maupun senang.

commit to user

PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Almamaterku
- ❖ Keluargaku tercinta
- ❖ Semua teman-temanku MESP XIV/ 2010
- ❖ Pembaca yang budiman

commit to user

ABSTRACT**RIZKA DIAN RACHMAWATI****ANALYSIS IMPACT OF NATIONAL PROGRAM FOR SOCIETY
EMPOWERMENT – RURAL AREA (PNPM-MP) ON THE ECONOMY OF
MEMBERS SAVINGS AND LOANS BUSINESS ECONOMY
PRODUCTIVE (UEP) IN SUB DISTRICT OF TANGEN, DISTRICT OF
SRAGEN**

The purpose of this study were (1) know the profile of PNPM-MP credit recipients, (2) know the role of mentoring in the implementation of the PNPM-MP program and (3) determine the impact of PNPM-MP program to the increased of production, employment, income of PNPM-MP group members. The hypothesis proposed in this study: (1) suspected that PNPM-MP program increases the production of members, (2) suspected that PNPM-MP program increases the amount of labor; and (3) suspected that PNPM-MP program increases the income of members.

Populations of this study are members of savings and loans (UEP) PNPM-MP receiver in Sub District of Tangen, amounting to 628 people scattered in seven villages and divided in 128 groups of UEP. Samples were taken by 100 respondents in Proportional Cluster Random Sampling technique that divides in the PNPM-MP beneficiaries in Sub District of Tangen is on 7 villages. Jekawal 14 peoples (14%), Galeh 19 peoples (19%), Ngrombo 6 peoples (6%), Denanyar 12 peoples (12%), Sigit 7 peoples (7%), Dukuh 15 peoples (15%), and Katelan 27 people (27%).

Hypothesis test results found that (1) PMPM-MP program in the Sub District of Tangen has a significant impact on production value of UEP members, first hypothesis proved (2) PMPM-MP program in the Sub District of Tangen has a significant impact on the employment of UEP members, the second hypothesis proved (3) PMPM-MP program in the Sub District of Tangen has a significant impact on earnings of UEP members, third hypothesis proved.

Based on data analysis obtained the following conclusions: (1) Women's involvement in UPK activities mainly through productive economic activities should always be given mentoring and monitoring. Monitoring activities are intended for activities that receive assistance can be maintained. UPK managers must be able to provide coaching and mentoring, because with coaching and mentoring, the efforts that initially financed by the UPK can grow to be larger. (2) PMPM-MP program in the Sub District of Tangen worth keeping because its implementation actually provides benefits to the society, through the development of infrastructure and facilities that support social and economic activities of society.

Keywords : PNPM-MP, UEP, District Sragen

commit to user

ABSTRAKSI

RIZKA DIAN RACHMAWATI

ANALISIS DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) TERHADAP PEREKONOMIAN ANGGOTA SIMPAN PINJAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) DI KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui profil penerima kredit PNPM-MP, (2) mengetahui peran pendampingan dalam pelaksanaan program PNPM-MP dan (3) mengetahui dampak program PNPM-MP terhadap peningkatan produksi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan penghasilan anggota kelompok PNPM-MP.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini : (1) diduga program PNPM-MP meningkatkan hasil produksi anggota, (2) diduga program PNPM-MP meningkatkan jumlah tenaga kerja dan (3) diduga program PNPM-MP meningkatkan penghasilan anggota.

Populasi dari penelitian ini adalah anggota simpan pinjam (UEP) penerima PNPM-MP Kabupaten Tangen yang berjumlah 628 orang yang tersebar di 7 Desa dan terbagi dalam 128 kelompok UEP. Sampel diambil sebanyak 100 orang responden dengan teknik *Proportional Cluster Random Sampling* yang terbagi pada penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tangen adalah pada 7 desa Desa Jekawal 14 orang (14%), Desa Galeh 19 orang (19%), Ngrombo 6 orang (6%) , Desa Denanyar 12 orang (12%), Desa Sigit 7 orang (7%) , Desa Dukuh 15 orang (15%), dan Katelan 27 orang (27%).

Hasil uji hipotesisi ditemukan bahwa (1) Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan tangen mempunyai dampak yang signifikan terhadap nilai produksi anggota UEP, hipotesis 1 terbukti (2) Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan tangen mempunyai dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja anggota UEP, hipotesis 2 terbukti (3) Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan tangen mempunyai dampak yang signifikan terhadap penghasilan anggota UEP, hipotesis 3 terbukti.

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Keterlibatan perempuan dalam kegiatan UPK terutama melalui kegiatan ekonomi produktif haruslah selalu diberikan pendampingan dan pemantauan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan agar dari kegiatan-kegiatan yang mendapat bantuan dapat dipertahankan. Pengelola UPK haruslah dapat memberikan pembinaan dan pendampingan, karena dengan pembinaan dan pendampingan maka usaha-usaha yang semula dibiayai oleh UPK dapat berkembang menjadi lebih besar. (2) Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) layak dipertahankan karena dalam pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, melalui pembangunan parasarana dan sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : PNPM-MP, UEP, Kabupaten Sragen

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha pemurah atas rahmad dan anugrahnya yang penulis rasakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul :

ANALISIS DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) TERHADAP PEREKONOMIAN ANGGOTA SIMPAN PINJAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) DI KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, terlebih keterbatasan penulis dalam wawasan dan pengalaman terkait obyek yang diteliti. Namun demikian harapan kami semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lanjut.

Dalam penyusunan tesis ini berbagai kendala dihadapi penulis, namun demikian rasanya menjadi ringan ketika ketulusan-ketulusan hadir dari berbagai pihak yang mengulurkan bantuan kepada penulis. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr.J.J. Sarungu, M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta .
2. Dr. Agustinus Suryantoro, M.S. selaku pembimbing I yang memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

commit to user

3. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa memberi dorongan serta meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan ,sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
4. Segenap Dosen Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Karyawan dan Karyawati Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Ketua dan Pengurus UPK Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.
7. Bapak Camat Tangen.
8. Papa dan mama tercinta yang telah menyemangati,memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk penulis.
9. Kakak dan adik tercinta Drajat Muhammad Nur,SH.,SE dan Faried Muhammad Yamin yang mendukung dengan doa.
10. Teman-teman MESP angkatan XIV/2010, terimakasih atas kerjasama yang baik dalam meraih sukses bersama.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang telah membantu keberhasilan penyusunan tesis ini.

Surakarta, Agustus 2011

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A.. LatarBelakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	9

commit to user

1. Pemberdayaan Masyarakat	9
a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	9
b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	13
c. Praktik Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini	16
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).....	21
a. Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri.....	21
b. Latar Belakang PNPM	23
c. Dasar Hukum PNPM	26
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan (PNPM –MP)	29
a. Latar Belakang PNPM –MP	29
b. Tujuan PNPM MP.....	30
c. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan	31
d. Peran Pelaku PNPM – MP	34
4. Kemiskinan	38
a. Pengertian Kemiskinan	38
b. Dimensi Kemiskinan.....	42
5. Nilai Produksi	43
6. Tenaga Kerja	43
7. Penghasilan	45
B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Pemikiran.....	51
D. Hipotesis.....	52
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Data dan Sumber Data	53

B. Populasi dan Sampel	53
C. Definisi Operasional	55
D. Analisis Data	56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kabupaten Sragen	58
B. Profil Penerima PNPM- MP di Kecamatan Tangen.....	65
C. Peran Pendampingan Dalam pelaksanaan PNPM-MP di KecamatanTangen.....	74
D. Analisis Data	80
E. Pembahasan.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2010	61
Tabel 4.2. Rumah Sakit di Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2008	63
Tabel 4.3. Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Sragen	64
Tabel 4.4. Luas Wilayah Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen	65
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Kelompok Desa	65
Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Jekawal Tangen Sragen	66
Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Galeh Tangen Sragen	66
Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Ngrombo Tangen Sragen	67
Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Denanyar Tangen Sragen	67
Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Sigit Tangen Sragen	68
Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Dukuh Tangen Sragen	68
Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Katelan Tangen Sragen	69
Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel 4.14. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur	70
Tabel 4.15. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan	71
Tabel 4.16. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Pinjaman	72

Tabel 4.17. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha 72

Tabel 4.18. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jangka Waktu 73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran.....	51
------------------------------------	----



commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner

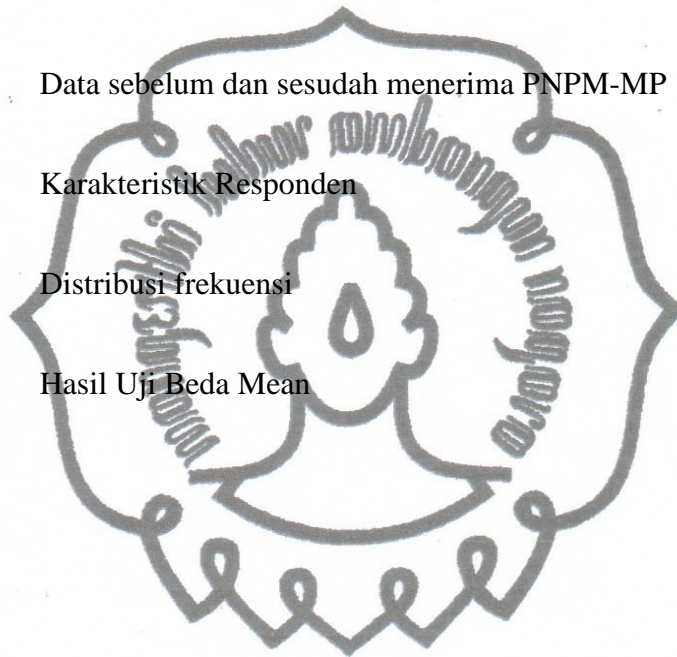
Lampiran 2 Data Responden

Lampiran 3 Data sebelum dan sesudah menerima PNPM-MP

Lampiran 4 Karakteristik Responden

Lampiran 5 Distribusi frekuensi

Lampiran 6 Hasil Uji Beda Mean



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan menjadi salah satu problem sosial yang amat serius. Masalah ini juga masalah yang tidak ada habisnya di bahas dan masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kekurangan pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern saat ini mereka tidak memiliki fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman moderen.

Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen. Kondisi ini memburuk, pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsurangsur kondisi ini terus membaik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42 persen.

commit to user

Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar 2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 persen. Meskipun secara persentase telah terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya (Bappenas, 2004).

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja maka salah satu jalan adalah dengan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa,

pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya

dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Pendulum PNPM Mandiri, 2007).

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 juga mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pendekatan PNPM MANDIRI merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen termasuk salah satu yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM

MANDIRI) karena lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian dalam desa tersebut tidak begitu dapat memberikan hasil sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam pada bank sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik.

Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen diketahui bahwa jumlah penduduk tahun 2010 sejumlah 28. 357 jiwa terdiri dari 8.306 KK. Laki-laki 14.032 jiwa, perempuan 14.325 jiwa. Jumlah penduduk miskin sebanyak 4.368 jiwa dengan jumlah KK miskin sebesar 978 KK. PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tangen lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Perdesaan diharapkan membawa perubahan yang positif baik dalam masalah lingkungan maupun perihal keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen menarik untuk dibahas. Pertama, masalah kemiskinan adalah permasalahan global yang hampir dialami oleh semua Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya, khususnya di Kecamatan Tangen. Alasan kedua karena PNPM Mandiri Perdesaan dianggap sebagai solusi sebagai Program Pengentasan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu menekan dengan maksimal angka kemiskinan di Indonesia,. Disamping itu juga, sisi menarik dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen yaitu untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan maksimal seperti apa yang menjadi tujuan, prinsip, dan sasaran.

B. Perumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian dan memperlancar data dan fakta ke dalam bentuk penulisan ilmiah, maka perlu perumusan masalah dengan jelas, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman arah penelitian. Rumusan masalah sering diartikan sebagai pembatasan masalah atau formulasi data. Rumusan masalah mencerminkan masalah pokok

penelitian (Sudarwan Danim, 2002). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah profil penerima kredit PNPM-MP di Kecamatan Tangen ?
2. Bagaimanakah peran pendampingan dalam pelaksanaan program PNPM-MP ?
3. Bagaimanakah dampak program PNPM-MP terhadap peningkatan nilai produksi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan penghasilan anggota kelompok ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tentu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian adalah jawaban atas pertanyaan apa yang akan dicapai dalam penelitian itu menurut misi ilmiah (Sudarwan Danim, 2002). Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui profil penerima kredit PNPM-MP.
2. Mengetahui peran pendampingan dalam pelaksanaan program PNPM-MP
3. Mengetahui dampak program PNPM-MP terhadap peningkatan nilai produksi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan penghasilan anggota kelompok.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai alat informasi tentang profil masyarakat penerima dana PNPM-MP serta untuk memberi informasi bagi masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program PNPM-MP.
2. Sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan pembandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

E. Tinjauan Pustaka

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Mardi Yatmo Hutomo, 2000).

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4)

commit to user

kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Usaha ekonomi masyarakat perdesaan merupakan salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat di perdesaan yang diyakini mampu bertahan di tengah tengah krisis yang melanda perekonomian suatu negara, karena pengelolaannya langsung dan jauh dari intimidasi pihak luar. Pemerintah selalu berusaha memproteksinya sebagai upaya keseriusan Pemerintah dalam melindungi eksistensi perekonomian masyarakat. Usaha ekonomi masyarakat perdesaan adalah cerminan

dari watak dan karakter perekonomian bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam pengelolaan bahkan pengembangannya. Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Karena itu, pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dilakukan dengan baik dan jauh dari upaya yang mengeksploitasi potensi ekonomi masyarakat.

Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat berorientasi pada semangat kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan bersama. Dalam upaya membangun usaha serta mengembangkannya, selain disatu sisi menjiwai semangat persaudaraan tapi disisi lain juga membutuhkan jiwa entrepreneurship (kewirausahaan), artinya bahwa pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dibutuhkan orang yang memiliki jiwa inovatif, kreatif serta berani mengambil resiko.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah

penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga

yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrower*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan (Mardi Yatmo Hutomo, 2000).

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata. Karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen dan kebijakan semua departemen. Sebab sekali lagi, dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, bersifat multi. Sumodiningrat (1999), memberikan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi

commit to user

dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.

- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumber daya manusia.
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

- 5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial
- 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu

commit to user

kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

b. Praktik Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini

Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), PNPM, secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) bantuan pendampingan ; (4) penguatan kelembagaan; dan (5) penguatan kemitraan usaha (Hutomo, 2000).

1) Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu

penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu dicermati bersama.

Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah atau gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi *kere*. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman. *Affirmative action* untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

2) Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3) Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat.

4) Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak

tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pengembangan kelembagaan ekonomi dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5) Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

a. Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

- 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan *commit to user*

pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

- 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Departemen Dalam Negeri, 2007)

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah : (Departemen Dalam Negeri, 2007)

1) Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

commit to user

- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

b. Latar Belakang PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diluncurkan Pemerintah pada bulan Agustus 2006 dan dilaksanakan di 70.000 desa selama tiga tahun, dari tahun 2007 sampai 2009. Pada tahun pertama PNPM dilaksanakan di hampir 2.000 kecamatan

pedesaan dan kemudian pada tahun 2008 di 3.600 kecamatan. Sedangkan kecamatan-kecamatan sisanya dilaksanakan pada tahun 2009. Secara umum PNPM dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan umum, dan peningkatan kapasitas lembaga lokal yang berbasis masyarakat. Selain itu, PNPM diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka lebih mengefektifkan upaya-upaya pengurangan kemiskinan.

Secara khusus, PNPM yang mempunyai target untuk menurunkan jumlah serta meningkatkan partisipasi orang miskin tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi, serta lapangan kerja.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian kegiatan pembangunan.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Untuk program tersebut PNPM-PPK mengalokasikan BLM melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya *cost sharing*

commit to user

disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/ 2006 per 30 Agustus 2006. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan keseriusan Pemda dan aparat di daerah dalam menjalankannya.

Dalam pelaksanaannya, PNPM menggunakan pendekatan PPK di mana Pemerintah menyediakan sejumlah dana block grant kepada kecamatan tertentu berdasarkan besar populasi dan tingkat kemiskinan. Pada saat yang sama Pemerintah Daerah melalui alokasi APBD juga menyediakan dana dampingan sesuai dengan ketentuan yang ada. Desa-desanya di kecamatan tersebut bersaing untuk mendapatkan dana ini dengan cara melalui penyampaian proposal. Masyarakat desa memilih fasilitator desa yang membantu proses sosialisasi dan perencanaan, terutama dalam menentukan kebutuhan dan skala prioritasnya. Kemudian mereka menentukan jenis proyek yang dibiayai oleh dana ini dan menuangkannya dalam proposal. Jika proyek sudah disetujui, maka PNPM mengirim konsultan pendamping untuk membantu masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek.

Pada akhir program, PNPM diproyeksikan dapat menyentuh sekitar 16 juta orang miskin di seluruh Indonesia. Dengan jumlah dana hibah sekitar Rp 3 milyar per kecamatan, maka diproyeksikan antara 20 – 26 juta orang miskin mendapatkan pekerjaan dan sekaligus penghasilan. Dan bila hibah yang dipatok untuk tiap-tiap kecamatan

sebesar Rp 1,5 milyar, maka orang miskin yang mendapat pekerjaan dan penghasilan berkisar antara 10 – 16 juta orang pada akhir program (2009).

c. Dasar Hukum PNPM

Di dalam Peraturan Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Departemen Dalam Negeri, 2007) disebutkan bahwa dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan.
- c) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

2) Sistem Perencanaan

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
3. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

3) Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597).
 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah.
 7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan (PNPM – MP)

a. Latar Belakang PNPM -MP

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. (Departemen Dalam Negeri, 2008)

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di

lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelebagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

b. Tujuan PNPM MP

Tujuan Umum :

PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong

commit to user

kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)
- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan (Departemen Dalam Negeri, 2008)

c. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang

commit to user

akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- 1) *Bertumpu pada pembangunan manusia.* Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- 2) *Otonomi.* Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- 3) *Desentralisasi.* Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- 4) *Berorientasi pada masyarakat miskin.* Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- 5) *Partisipasi.* Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

- 6) *Kesetaraan dan keadilan gender*. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- 7) *Demokratis*. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- 8) *Transparansi dan Akuntabel*. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative.
- 9) *Prioritas*. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- 10) *Keberlanjutan*. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

commit to user

pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. (Departemen Dalam Negeri, 2008)

a. Peran Pelaku PNPM – MP

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi:

1) Kepala Desa (Kades)

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD atau sebutan lainnya)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa.

3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil MAD keanggotaan TPK dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

4) Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta

commit to user

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDesa dan RKPDes. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada.

5) Tim Pemantau

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan).

6) Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perencanaan. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara

didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (KPMD/K)

KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk

memfasilitasi dan membantu FK dalam tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.

8) Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok SPP, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan sebagainya (Departemen Dalam Negeri, 2008).

4. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suharto, dkk, 2004).

Kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang

bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif (Bappenas, 2004).

Empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu *pertama*, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cenderung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-

faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. **Ketiga**, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. **Keempat**, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cenderung mempersalahkan kemiskinan bersumber dari dalam diri si miskin itu sendiri. Ketiga lebih mencerminkan aliran liberalisme, yang cenderung menyalahkan ketidakmapuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat dipengaruhi oleh pandangan radikalisme yang mempersalahkan hakekat atau perilaku negara kapitalis.

Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan

seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Memahami substansi kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencanaan program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Loekman Sutrisno (2003), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok *agrarian populism*, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk

memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.

b. Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang berwajah-wajah. Cox, David (2004) membagi kemiskinan dalam beberapa dimensi :

- 1) Kemiskinan yang disebabkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan sub sistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang diakibatkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- 3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
- 4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar dan si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

a. Nilai Produksi

Nilai Produksi adalah hasil akhir dari suatu proses produksi, dimana produksi dinilai berdasarkan omset penjualan yaitu jumlah produksi yang terserap dipasar atau produk total yang terjual dikalikan dengan harga masing-masing produk dengan satuan rupiah.

Nilai produksi suatu barang sangatlah berbeda-beda, hal itu sangat tergantung pada minat para konsumen dalam membeli suatu barang. Semakin dibutuhkan barang tersebut semakin meningkat nilai produksi karena produksi yang terjual dipasar semakin banyak untuk melaksanakan kegiatan produksi tersebut tentu saja perlu dibuat suatu perencanaan yang menyangkut apa yang akan diproduksi, berapa anggarannya dan bagaimana pengendalian atau pengawasannya. Bahkan harus perlu difikirkan, kemana hasil produksi akan didistribusikan, karena pendistribusian dalam bentuk penjualan hasil produksi pada akhirnya merupakan penunjang untuk kelanjutan produksi. Pada hakikatnya kegiatan produksi akan dapat dilaksanakan bila tersedia faktor-faktor produksi, antara lain yang paling pokok adalah berupa orang atau tenaga kerja, uang atau dana, bahan-bahan baik bahan baku maupun bahan pembantu dan metode.

6. Tenaga Kerja

Perekonomian di kebanyakan negara berkembang bahkan di beberapa negara maju adalah fenomena jumlah dan tingginya

peningkatan penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal ini didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor informal.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga kerja sektor informal. Sektor informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Sedangkan ciri-ciri kegiatan-kegiatan informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), becak, penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya

Tenaga kerja merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan dalam sebuah usaha disamping modal. Perencanaan tenaga kerja adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh

wiraswasta guna menjamin bahwa tersedia tenaga kerja yang dapat diberdayakan selain dirinya sendiri sebagai seorang wirausaha.

7. Penghasilan

Bagi semua perusahaan ataupun usaha perseorangan baik, yang berorientasi laba maupun tidak, penghasilan merupakan faktor utama yang mendukung berhasil tidaknya suatu perusahaan. Tanpa penghasilan yang cukup, kelangsungan hidup suatu perusahaan perlu diragukan.

IAI (2004) mendefinisikan penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam melaksanakan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalty, dan sewa. Penghasilan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam melaksanakan aktivitas perusahaan yang biasa.

Melihat definisi tersebut, maka penghasilan akan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa

pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman.)

Penghasilan juga dapat disebut dengan pendapatan. Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencaharian usaha. Budiono (1992) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi (1992) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi. Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pendapatan jasa adalah nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu.

F. Penelitian Terdahulu

1. Parikha (2007) dengan judul Studi Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses kegiatan PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tahun 2007 telah berjalan

dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun keberhasilan proses tersebut tidak diiringi dengan keberhasilan tujuan utamanya yaitu pengentasan kemiskinan. Karena kenyataan di lapangan hanya sebagian masyarakat yang dapat memanfaatkan bantuan sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Dengan demikian PNPM-PPK kurang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan.

2. Warih Budiyono Setyawan (2008) dengan judul Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK di Kecamatan Karangmojo telah berjalan dengan berpegang pada prinsip-prinsip program itu sendiri. Proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berpegang pada prinsip desentralisasi, keterbukaan, keterlibatan orang miskin dan keterlibatan perempuan serta pelestarian akan memungkinkan tercapainya tujuan program terhadap penguatan kapasitas masyarakat di kecamatan Karangmojo. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo juga telah dapat membangun prasarana fisik yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, berupa jalan, los pasar, jembatan, walaupun belum dapat merata di setiap desa atau dusun. Untuk kegiatan ekonomi berupa pemberian bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam, telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Melalui bantuan kegiatan fisik dan ekonomi maka PPK sebagai salah satu program yang berbasis pemberdayaan, akan

memberikan kemudahan akses sosial ekonomi yang pada akhirnya memberikan kondisi perbaikan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Walaupun belum dapat dikatakan dengan adanya pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah mampu mengubah secara langsung dan dalam waktu yang singkat terhadap tingkat kemiskinan namun dimungkinkan akan mendorong ke kehidupan yang lebih baik dan secara pelan namun pasti terwujud. Pada akhirnya PPK harus dipertahankan sebagai sebuah program pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan partisipatif.

3. Otto Dwana Sagala (2009) dengan judul Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap Pengembangan Sosio-Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samusir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Balige belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik. Sarana dan prasarana fisik dibangun belum menjadi prioritas utama. Hal ini karena tidak jelas manfaat serta pemanfaatnya. Tingkat partisipasi masyarakat belum datang dari hati nurani tetapi masih digerakkan oleh tokoh-tokoh (*informal leader*) yang ada di desa tersebut. Dampak PNPM-MP terhadap kondisi sosio ekonomi pendapatan dan pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP berbeda nyata secara positif. Demikian juga pendapatan dan pendidikan masyarakat yang tidak menerima PNPM-MP juga signifikan atau berbeda nyata. Justru kenaikan

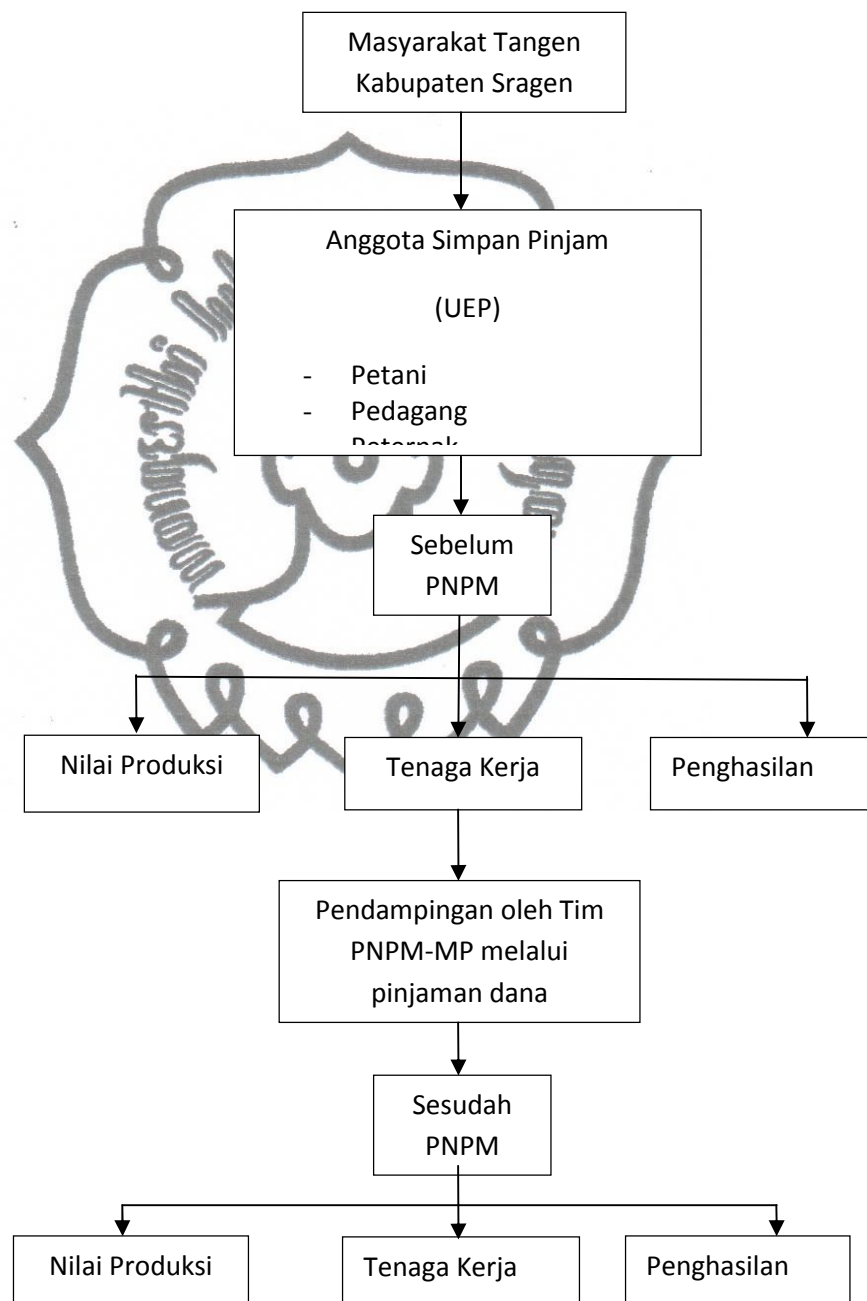
pendapatan dan pendidikan masyarakat yang menerima Program PNPM-MP lebih rendah, karena umumnya masyarakatnya miskin, tingkat kualitas sumberdaya manusia rendah dan secara umum pekerjaan mereka adalah petani. Dengan adanya program PNPM-MP di Kecamatan Baligemenciptakan peluang kerja kepada masyarakat.

4. Ratih Twidaryati (2010) dengan judul Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan rata-rata jumlah produktivitas hipotesis 1 terbukti, (2) terdapat perbedaan rata-rata penghasilan perbulan yang positif secara signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM-MP, dengan demikian hipotesis 2 terbukti, dan (3) terdapat perbedaan rata-rata jumlah tenaga kerja yang positif secara signifikan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan demikian hipotesis 3 terbukti. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut (1) anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM-MP di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen mayoritas adalah perempuan dengan pendidikan yang masih rendah yaitu SLTP, (2) anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM-MP untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, produktivitas dan penghasilan, (3) adanya perbedaan jumlah tenaga kerja, produktivitas dan penghasilan anggota kelompok UPPKS di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sebelum dengan setelah adanya PNPM-MP.

5. Amalia Tiza (2010) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya . Hasil dalam penelitian yang mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya tentang pelatihan komputer masih mengalami beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Dan dari hasil pelatihan tersebut telah dilakukan beberapa evaluasi yang di wakili oleh Bapak Lurah Kelurahan Wonorejo salah satu hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan komputer di Kelurahan Wonorejo melalui program PNPM adalah sistem dalam manajemen yang kurang tertata dengan baik sehingga berdampak pada pengadaan fasilitas dan kegiatan pelatihan.
6. Erwin Permana (2010) dengan judul Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoranmas Depok). Hasil penelitian Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sangat menekankan prinsip-prinsip diantaranya: bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokrasi, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlangsungan dan sederhana.

C. Kerangka Pemikiran

Dari telaah pustaka di muka, maka disusun suatu kerangka pemikiran, untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran teoritis digambarkan berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan awal atau kesimpulan sementara hubungan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebelum dilakukan penelitian dan harus dibuktikan melalui penelitian. Dimana dugaan tersebut diperkuat melalui teori atau jurnal yang mendasari dan hasil dari penelitian terdahulu. Berdasarkan pada kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga program PNPM-MP meningkatkan nilai produksi anggota.
2. Didiuga program PNPM-MP meningkatkan jumlah tenaga kerja.
3. Diduga program PNPM-MP meningkatkan penghasilan anggota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data dan Sumber Data

Data diperoleh dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara langsung dengan angket atau kuesioner dan observasi sedangkan data sekunder didapat dari laporan tertulis dari kelompok penerima dana PNPM-MP yang ada di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2005). Populasi dari penelitian ini adalah anggota simpan pinjam (UEP) penerima PNPM-MP Kecamatan Tangen yang berjumlah 628 orang yang tersebar di 7 Desa dan terbagi dalam 128 kelompok UEP.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan sebagian atau populasi yang menjadi subjek penelitian, yang dapat mewakili populasi penelitian. Arikunto (2006). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Proportional Cluster Random Sampling*, yaitu didalam pengambilan sampelnya peneliti berdasarkan kelas dari populasi telah ditetapkan.

Proportional dilakukan dengan mengambil proporsi tiap-tiap kelas.

Cluster dilakukan dengan cara melakukan randomisasi dalam dua tahap yaitu randomisasi untuk *cluster* atau menentukan sampel daerah kemudian randomisasi atau menentukan orang atau unit yang ada di wilayah dari populasi *cluster* terpilih (Hidayat, 2007 : 49). Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan rumus sebagai berikut : (Husein Umar, 2004 : 108)

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan :

N : Besar populasi

n : Besar sampel

d : Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan (0% - 10%)

$$n = \frac{628}{1 + 628(0,10)^2}$$

$$\frac{628}{7,28} = 86,26 \text{ sampel dibulatkan menjadi 100 responden.}$$

Sedangkan besarnya untuk masing-masing Desa di Kecamatan Tangen dalam pembagian responden dapat menggunakan formula yang lebih sederhana lagi seperti berikut :

$$n = \frac{F}{N} \times n \text{ (Riduwan, 2006 : 52)}$$

Keterangan :

n : Sampel dari masing-masing kelas

N : Jumlah semua populasi

F : Jumlah masing-masing kelas

Tabel 3.2 Jumlah perhitungan sampel

No	Desa	Jumlah	Populasi	Sampel
		F (n)	N	$n = (F/N) \times n$
1	Jekawal	88	100	$n_1 = 14$
2	Galeh	119	100	$n_2 = 19$
3	Ngrombo	35	100	$n_3 = 6$
4	Denanyar	74	100	$n_4 = 12$
5	Sigit	46	100	$n_5 = 7$
6	Dukuh	92	100	$n_6 = 15$
7	Katelan	169	100	$n_7 = 27$
	Jumlah	628		$n_t = 100$

C. Definisi Operasional

1. Dana PNPM-MP

Dana PNPM-MP adalah dana yang berupa kredit yang berasal dari PNPM-MP yang dimaksudkan untuk modal usaha. Modal usaha merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan usaha karena tanpa modal usaha tidak akan dapat melakukan kegiatan usaha. Pengukuran dengan satuan rupiah.

2. Nilai Produksi

Nilai produksi adalah hasil akhir proses produksi ataupun usaha yang dilakukan oleh anggota simpan pinjam. Dalam penelitian ini produksi dinilai dari jumlah produksi yang terserap atau produk total terjual dipasar dikalikan dengan harga masing-masing. Satuan yang digunakan adalah rupiah.

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses kegiatan usahanya. Satuan yang digunakan adalah jumlah orang yang terlibat dalam proses usaha.

4. Penghasilan usaha sebelum PNPM

Penghasilan usaha adalah pendapatan bersih yang diperoleh oleh anggota simpan pinjam sebelum adanya PNPM selama satu bulan dan dihitung dalam satuan rupiah

5. Penghasilan usaha setelah PNPM

Penghasilan usaha adalah pendapatan bersih yang diperoleh oleh anggota simpan pinjam setelah adanya PNPM selama satu bulan dan dihitung dalam satuan rupiah.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji beda mean. Uji beda dua mean untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai produksi, tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh anggota kelompok simpan pinjam (UEP) sebelum dan setelah adanya program PNPM-MP. Statistik uji yang digunakan adalah Uji Z dengan prosedur sebagai berikut :

$$Z_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Keterangan :

\bar{X}_1 = rata-rata nilai produksi, tenaga kerja dan penghasilan setelah pelaksanaan program

\bar{X}_2 = rata-rata nilai produksi, tenaga kerja dan penghasilan sebelum pelaksanaan program

n_1 = Banyaknya sampel kelompok setelah PNPM-MP

n_2 = Banyaknya sampel kelompok sebelum PNPM-MP

s = Standar deviasi

Prosedur :

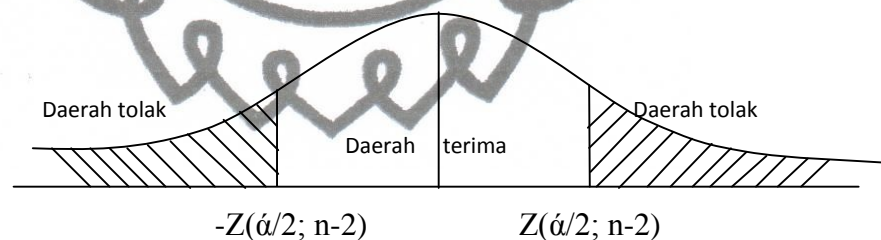
1. Hipotesis

$H_0 \quad b_1 = 0$ Tidak ada perbedaan rata-rata nilai produksi, tenaga kerja dan penghasilan sebelum dan sesudah pelaksanaan program

$H_1 \quad b_1 \neq 0$ Ada perbedaan rata-rata nilai produksi, tenaga kerja dan penghasilan sebelum dan sesudah pelaksanaan program

Tingkat signifikansi : $\alpha = 0,05$

2. Kriteria pengujian



3. Kriteria rumus

$$Z_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

4. Kesimpulan

H_0 diterima jika $Z_{hitung} \leq Z_{tabel}$

H_0 ditolak jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

F. Profil Kabupaten Sragen

1. Kondisi Geografis dan Demografi

Luas wilayah Kabupaten Sragen 941,55 Km² ini terbagi menjadi 20 Kecamatan, 208 Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan di sebelah utara, kabupaten Karanganyar disebelah selatan, Kabupaten Boyolali di sebelah barat, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di sebelah timur. Secara geografis terletak di 715' - 730' LS, 11045' - 11110' BT. Sragen dibelah oleh sungai Bengawan solo menjadi dua bagian, utara dan selatan, kegiatan Kabupaten Sragen bagian selatan menjadi sentra pertanian tanaman pangan karena kondisi tanah yang subur dan pengairan yang lebih baik dengan hasil pertanian utama Kabupaten sragen adalah padi menjadikan daerah ini sebagai lumbung padi di Jateng.

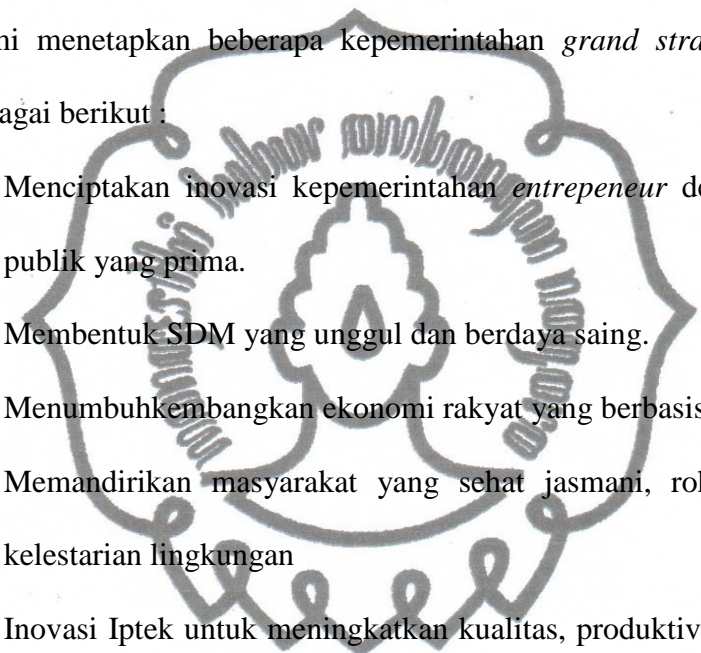
Hari Jadi Kabupaten Sragen ditetapkan dengan Perda Nomor : 4 Tahun 1987, yaitu pada hari Selasa Pon, tanggal 27 Mei 1746. tanggal dan waktu tersebut adalah dari hasil penelitian serta kajian pada fakta sejarah, ketika Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono yang ke- I menancapkan tonggak pertama melakukan perlawanan terhadap Belanda menuju bangsa yang berdaulat dengan membentuk suatu Pemerintahan lokal di Desa Pandak, Karangnongko masuk tlatah Sukowati sebelah timur.

commit to user

Di sektor peternakan, populasi ternak dan produksi daging daerah ini cukup diunggulkan untuk memutar roda perekonomian daerah. Kemitraan usaha peternakan ayam ras potong, penggemukan sapi, kambing, domba menjadi lapangan usaha yang menjanjikan. Pertanian secara keseluruhan memang menjadi kontributor yang utama dalam total perekonomian daerah. Hasil-hasil pertanian seperti beras, buah-buahan, kacang hijau, dan ternak kemudian mewarnai perdagangan lokal dan antar daerah. Untuk Kabupaten Sragen bagian utara tanahnya kering dan berkapur mengarahkan penduduknya pada kegiatan berkebun, berdagang, dan industri pengolahan. Selain berkecimpung dengan bertani dan beternak, membatik dan membuat mebel merupakan keahlian penduduk yang produksinya tentu saja turut memperkuat sektor perdagangan dengan Kecamatan Masaran dan Plupuh menjadi sentra pembatikan di daerah ini yang menghasilkan batik bermutu.

Usaha pengolahan kayu menjadi barang mebel banyak dilakukan oleh penduduk terutama di Kecamatan Kalijambe, dengan bahan baku kayunya lebih banyak berasal dari Kabupaten Blora daripada dari hutan Sragen. Industri lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah tekstil setidaknya terdapat enam perusahaan tekstil berskala besar yang berlokasi di kecamatan Masaran dan Sidoarjo. Sejumlah sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan juga dipersiapkan untuk menarik investor mengembangkan usaha, jaringan transportasi, jalan utama, dan rel kereta api jalur utara dan selatan yang melintasi Kabupaten Sragen menjadikan daerah ini ke kota-kota besar di Jawa menjadi mudah.

Visi Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2011 yaitu ”Sragen Menjadi Kabupaten Cerdas”. Sedangkan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen adalah ”Mewujudkan Rakyat Yang Unggul, Produktif dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan Kabupaten Sragen yang cerdas pada Tahun 2011, sebagaimana yang diinginkan dalam visi dan misi diatas, kami menetapkan beberapa pemerintahan *grand strategy* antara lain sebagai berikut :

- 
- Menciptakan inovasi pemerintahan *entrepreneur* dengan pelayanan publik yang prima.
 - Membentuk SDM yang unggul dan berdaya saing.
 - Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat yang berbasis desa
 - Memandirikan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan peduli kelestarian lingkungan
 - Inovasi Iptek untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan efisiensi pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sragen menentukan prioritas pembangunan 2006 – 2011 yang ditetapkan adalah sebagai berikut : peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Wilayah Kabupaten Sragen meliputi areal seluas 941,55 Km² yang terbagi menjadi 20 wilayah kecamatan dan 208 desa/kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Sumberlawang yaitu 75,16 km² (7,98%) dan paling sempit adalah kecamatan Sragen yaitu

seluas 2,90 km². sedangkan jumlah penduduk hingga tahun 2008 menunjukkan tertinggi adalah kecamatan Sragen 65,126 jiwa, kecamatan Masaran 64,804 jiwa dan selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2010

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	%	Jumlah Penduduk (Jiwa)	%	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Kalijambe	46.96	4.99	46.206	5.30	984
Plupuh	48.36	5.14	46.294	5.31	957
Masaran	44.04	4.68	65.506	7.51	1.487
Kedawung	49.78	5.29	58.498	6.71	1.175
Sambirejo	48.43	5.14	37.025	4.25	765
Gondang	41.17	4.37	43.512	4.99	1.057
Sambungmacan	38.48	4.09	43.937	5.04	1.142
Ngrampal	34.4	3.65	36.447	4.18	1.06
Karangmalang	42.98	4.56	57.961	6.65	1.349
Sragen	27.27	2.90	65.666	7.53	2.408
Sidoharjo	45.89	4.87	51.101	5.86	1.114
Tanon	51	5.42	54.717	6.28	1.073
Gemolong	40.23	4.27	46.011	5.28	1.144
Miri	53.81	5.72	32.406	3.72	602
Sumberlawang	75.16	7.98	45.421	5.21	604
Mondokan	49.36	5.24	34.223	3.92	693
Sukodono	45.55	4.84	31.377	3.60	689
Gesi	39.58	4.20	21.822	2.50	551
Tangen	55.13	5.86	28.357	3.25	490
Jenar	63.97	6.79	26.802	3.07	419
Jumlah	941.55	100	871.951	100	926

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen, Sragen Dalam Angka 2010

2. Aspek Pendidikan Kabupaten Sragen

Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia maka sektor pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya. Pendidikan merupakan usaha sistematis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menjadi bangsa yang maju, cerdas dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih maju.

Kabupaten Sragen telah memasuki kategori tuntas paripurna atau menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan telah merintis wajib belajar 12 tahun, antara lain menyediakan akses pendidikan menengah setingkat SMA di setiap kecamatan. Untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan maka juga didirikan TK/SD bertaraf internasional, perintisan sekolah bertaraf internasional serta melakukan kerjasama dengan Pasiad Turki dengan mendirikan *Sragen Bilingual Boarding School* (SBBS). Selain itu juga didirikan SMK untuk memenuhi tuntutan dunia kerja yang didirikan di beberapa kecamatan dengan penekanan pada aspek *Traning and Production*.

3. Aspek Kesehatan

Pada indikator derajat kesehatan masyarakat dapat disampaikan beberapa hal yang menggembirakan, hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapatnya sarana umum di bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Sragen. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada Tabel

4.2.

Tabel 4.2. Rumah Sakit di Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2008

NO	RUMAH SAKIT	NO. TELP	ALAMAT
1.	RSUD Sragen	0271-891068	Jl Raya Sukowati No.534.Sragen
2.	Rumah Sakit Islam Amal Sehat	0271-891661	Jl. Veteran No.35 Sragen
3.	Rumah Sakit Mardi Lestari	0271-891033	Jl. Rokan No.8 Sragen
4.	RSIA Sarila Husada	0271-891538	Jl. Veteran No.41-43 Sragen
5.	RSB Restu Ibu	-	Bendungan, Pilangsari, Ngrampal
6.	RSB Permata Hati	0271-891119	Jl. Sulawesi, No.1 Sragen
7.	RSB Dentatama	0271-892098	Jl. Perintis Kemerdekaan No.6
8.	RSIA Assalam	0271-6811329	Jl. Gatot Subroto Km. 1.5 Gemolong
9.	RS PKU Muhammadiyah	0271-644370	Jl. Raya Sragen-Solo Km 8 Masaran

Sumber data : Sragen Online

Keberhasilan di bidang kesehatan telah mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan sistem pelayanan, pemenuhan sarana prasarana dan kelengkapan tenaga medis (dokter dan dokter spesialis) maupun paramedis sampai ke tingkat desa. Pada indikator derajat kesehatan masyarakat, dapat digunakan untuk mengetahui status gizi masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, bayi dan balita. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

4. Aspek Administrasi Pemerintahan

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sragen pada tahun 2008 terbagi menjadi 20 Kecamatan, 197 Desa dan 12 Kalurahan, 2.492 Dukuh, 1.544 Rukun Warga dan 5.126 Rukun Tetangga. Hal ini merupakan perluasan dari tahun 2004 di mana terjadi pemekaran jumlah desa yang

semula 200 menjadi 197 sedangkan desa yang semula 8 menjadi 12 perubahan terjadi di wilayah Kecamatan Gemolong.

Tabel 4.3. Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Sragen

Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah RT
Kalijambe	14	216
Plupuh	16	258
Masaran	13	445
Kedawung	10	268
Sambirejo	9	216
Gondang	9	245
Sambungmacan	9	282
Ngrampal	8	220
Karangmalang	10	323
Sragen	8	355
Sidoharjo	12	306
Tanon	16	397
Gemolong	14	367
Miri	10	189
Sumberlawang	11	280
Mondokan	9	236
Sukodono	9	210
Gesi	7	146
Tangen	7	133
Jenar	7	148

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Sragen

5. Deskripsi Wilayah Kecamatan Tangen

Kecamatan Tangen merupakan satu dari dua puluh kecamatan di Kabupaten Sragen yang terletak di sebelah utara Bengawan. Adapun batas wilayah Kecamatan Tangen adalah

- sebelah Barat : Kecamatan Gesi
- sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- sebelah Timur : Kecamatan Jenar
- sebelah Selatan : Kecamatan Ngrampal.

Wilayah Tangen meliputi 7 (tujuh) desa yaitu : Jelawal, Galeh, Ngrombo, Denanyar, Sigit, Dukuh dan Ketelan. Dari ke tujuh desa tersebut terbagi lagi menjadi 27 kebayanan dan 163 RT. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sejumlah 28.357 jiwa terdiri dari 8.306 KK. Laki-laki 14.032 orang, perempuan 14.325 orang. Mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah pertanian.

Tabel 4.4. Luas Wilayah Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen

Luas Wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sawah	888,27	16,1
Tegal/Perkebunan	2257,69	40,9
Pekarangan	876,27	15,9
Hutan	1308,17	23,7
PadangGembalaan	22,27	0,5
Lain-lain	156,00	2,8
Jumlah	5512,54	100,00

G. Profil Penerima kredit PNPM-MP di Kecamatan Tangen

Pada penelitian ini profil penerima PNPM-MP dapat dilihat dari asal desa kelompok, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha, lama usaha dan lama angsuran.

1. Asal Desa Kelompok

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 7 Desa maka distribusi frekuensi per kelompok desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Kelompok Desa

Desa	Sampel	Persentase (%)
Jekawal	14	14.0
Galeh	19	19.0
Ngrombo	6	6.0
Denanyar	12	12.0
Sigit	7	7.0
Dukuh	15	15.0
Katelan	27	27.0
Jumlah	100	100

Sumber : data primer diolah

a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Desa Jekawal Tangen Sragen

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi adalah :

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Jekawal Tangen Sragen

Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Jumlah	(%)
Pertanian	Padi	6	42,9
	Jagung	4	28,6
Perdagangan	Dagang Bakso	1	7,1
	Toko Kelontong	1	7,1
	Gorengan	1	7,1
Jasa	Penjahit	1	7,1
Jumlah		14	100,0

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.6. tersebut diketahui bahwa penerima dana PNPM MP mandiri di Desa Jekawal Tangen Sragen yaitu sektor pertanian 10 orang, sektor perdagangan 3 orang dan jasa 1 orang.

b. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Desa Galeh Tangen Sragen

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Galeh maka distribusi frekuensi UEP adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Galeh Tangen Sragen

commit to user

Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Jumlah	(%)
Pertanian	Padi	2	10.5
	Jagung	3	15.8
	Tebu	2	10.5
Peternakan	Sapi	1	5.3
Perdagangan	Minyak Tanah	3	15.8
	Dagang Bakso	2	10.5
	Dagang Keliling	1	5.3
	Mainan Anak	1	5.3
	Air Mineral	1	5.3
Jasa	Transportasi	2	10.5
	Penjahit	1	5.3
Jumlah		19	100,0

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.7. tersebut diketahui bahwa mayoritas penerima dana PNPM MP mandiri di Desa Galeh Tangen Sragen adalah di sektor pertanian yaitu sebanyak 7 orang, sektor peternakan 1 orang, sektor perdagangan 8 orang dan sektor jasa 3 orang.

c. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Desa Ngrombo Tangen Sragen

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi UEP di Desa Ngrombo Tangen Sragen

Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Jumlah	(%)
Pertanian	Padi	3	48.9
	Jagung	2	29.6
Perdagangan	Toko Klontong	1	21.5
	Jumlah	6	100,0

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.8. tersebut diketahui bahwa penerima dana PNPM -MP di Desa Ngrombo Tangen Sragen di sektor pertanian sebanyak 5 orang, sektor perdagangan 1 .

d. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Desa Denanyar TangenSragen

commit to user
Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Denanyar Tangen Sragen

Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Jumlah	(%)
Pertanian	Padi	4	33.3
	Jagung	1	8.3
Perdagangan	Toko Kelontong	3	25.0
	Warung Nasi	1	8.3
	Pakaian Keliling	1	8.3
Jasa	Foto copy	1	8.3
	Candak Kulak	1	8.3
Jumlah		12	100,0

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.9. tersebut diketahui bahwa penerima dana PNPM- MP di Desa Denanyar Sragen di sektor pertanian sebanyak 5 orang, sektor perdagangan 5 orang dan sektor jasa 2 orang.

e. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Desa Sigit Tangen Sragen

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Sigit maka distribusi frekuensi UEP adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Sigit Tangen Sragen

Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Jumlah	(%)
Pertanian	Padi	3	42.9
	Jagung	2	28.6
Jasa	Rias Manten	1	14.3
	Candak Kulak	1	14.3
Jumlah		7	100,0

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.10. tersebut diketahui bahwa penerima dana PNPM-MP di Desa Sigit Tangen Sragen di sektor pertanian sebanyak 5 orang, dan sektor jasa 2 orang.

f. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Desa Dukuh Tangen Sragen

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Dukuh maka distribusi frekuensi UEP adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Dukuh Tangen Sragen

Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Jumlah	(%)
Pertanian	Padi	1	6.7
	Jagung	1	6.7
	Palawija	1	6.7
Perdagangan	Toko Kelontong	3	20.0
	Warung makan	2	13.3
	Pedagang Keliling	1	6.7
Jasa	Bengkel Mobil	1	6.7
	Candak Kulak	1	6.7
	Bengkel Kusen	1	6.7
	Penjahit	2	13.3
	Catering	1	6.7
Jumlah		15	100,0

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.11. tersebut diketahui bahwa penerima dana PNPM-MP di Desa Dukuh Tangen Sragen di sektor pertanian sebanyak 3 orang, perdagangan 6 orang dan sektor jasa 6 orang.

g. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Desa Katelan Tangen Sragen

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Katelan maka distribusi frekuensi UEP adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi UEP di Desa Katelan Tangen Sragen

Kelompok Usaha	Jenis Usaha	Jumlah	(%)
Pertanian	Padi	4	14.8
	Tebu	2	7.4
	jagung	2	7.4
Perdagangan	Jamu	1	3.7
	Bahan jamu	2	7.4

	Toko Kelontong	2	7.4
	Buah	2	7.4
	Pedagang Keliling	1	3.7
	Mie Ayam	1	3.7
	Roti	1	3.7
	Pakaian Jadi	1	3.7
	Susu Kedelai	1	3.7
Jasa	Seni Musik	1	3.7
	Bengkel Mobil	2	7.4
	Candak Kulak	1	3.7
Peternakan	Lele	3	11.1
Jumlah		27	100,0

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.12. tersebut diketahui bahwa penerima dana PNPM-MP di Desa Katelan Tangen Sragen di sektor pertanian sebanyak 8 orang, perdagangan 12 orang, jasa 4 orang dan peternakan 3 orang.

2. Jenis Kelamin

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	32	32
Perempuan	68	68
Jumlah	100	100

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.13. tersebut diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu 68 orang (68%) sedang responden laki-laki sebanyak 32 orang (32%).

3. Umur Responden

Distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase (%)
< 30 tahun	14	14
30 – 39 tahun	35	35
40 – 49 tahun	30	30
50 tahun ke atas	21	21
Jumlah	100	100

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.14. tersebut diketahui bahwa mayoritas responden mempunyai umur antara 30 – 39 tahun yaitu sebanyak 35 orang (35%), responden yang berusia 40 – 49 tahun sebanyak 30 orang (30%), responden yang berusia 50 tahun ke atas sebanyak 21 orang (21%) dan responden yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 14 orang (14%).

4. Pendidikan Responden

Distribusi responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.15. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	10	10
SMP	48	48

SMA/STM	40	40
PT	2	2
Jumlah	100	100

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.15. tersebut diketahui bahwa mayoritas responden berpendidikan SMP yaitu sebanyak 48 orang (48%), responden dengan pendidikan SMA/STM sebanyak 40 orang (40%), responden dengan pendidikan SD sebanyak 10 orang (10%) dan responden dengan pendidikan PT sebanyak 2 orang (2%).

5. Jumlah Pinjaman

Distribusi responden berdasarkan jumlah pinjaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.16. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Pinjaman

Jumlah Pinjaman	Jumlah	Persentase (%)
1.000.000,-	4	4
1.500.000,-	1	1
2.000.000,-	15	15
3.000.000,-	20	20
4.000.000,-	7	7
5.000.000,-	53	53
Jumlah	100	100

Sumber : data primer diolah

commit to user

Berdasarkan Tabel 4.16. tersebut diketahui bahwa mayoritas besar pinjamannya adalah Rp 5.000.000,- yaitu sebanyak 53 orang (53%) responden dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000,- sebanyak 20 orang (20%), responden dengan jumlah pinjaman Rp 4.000.000,- sebanyak 7 orang (7%), responden dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- sebanyak 4 orang (4%) dan responden dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000,- sebanyak 1 orang (1%).

6. Lama Usaha Responden

Distribusi responden berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase (%)
3 tahun	10	10
4 tahun	32	32
5 tahun	42	42
6 tahun	13	13
7 tahun	3	3
Jumlah	100	100

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.17. tersebut diketahui bahwa mayoritas responden lama usahanya adalah 5 tahun yaitu sebanyak 42 orang (42%), responden lama usaha 4 tahun sebanyak 32 orang (32%), responden dengan lama usaha 6 tahun sebanyak 13 orang (13%), responden dengan lama usaha 3 tahun sebanyak 10 orang (10%), responden dengan lama usaha 7 tahun sebanyak 3 orang (3%).

7. Jangka waktu Angsuran

Distribusi responden berdasarkan jangka waktu angsuran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.18. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jangka Waktu

Jangka waktu angsuran/bln	Jumlah	Persentase (%)
10	7	7
12	38	38
18	55	55
Jumlah	100	100

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.18. tersebut diketahui bahwa mayoritas responden jangka waktu angsuran tiap bulannya adalah 18 bulan yaitu sebanyak 55 orang (55%), responden dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebanyak 38 orang (38%) dan responden dengan jangka waktu angsuran 10 bulan sebanyak 7 orang (7%).

H. Peran Pendampingan Dalam Pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Tangen.

Fasilitator atau pendamping adalah orang yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dan membangun proses agar masyarakat kelompok sasaran melakukan kegiatan secara mandiri. Fasilitator atau pendamping adalah “orang luar” yang mendampingi masyarakat untuk menggali pengetahuan dan keterampilan mereka, bukan sebagai “guru” bahkan

fasilitator juga belajar mengenal keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Tugas pendamping PNPM-MP Kecamatan Tangen dalam hal ini dibagi ke dalam tiga hal yaitu sebagai konsultan, fasilitator dan pelatih.

Sebagai konsultan, Dalam hal ini pendamping harus mampu menjadikan dirinya tempat bertanya, menampung permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi para penerima dana PNPM-MP Kecamatan Tangen dan memberikan alternatif pemecahan masalah dengan keputusan tetap ada di tangan kelompok masyarakat sendiri. Sebagai seorang “fasilitator”, pendamping harus mampu memfasilitasi kebutuhan kelompok penerima PNPM-MP Kecamatan Tangen Sragen dalam hubungannya dengan pihak luar. Baik dalam hal menemukan akses sumberdaya atau pasar, maupun dalam mempromosikan kelompok agar mendapatkan pengakuan dari pihak luar atau masyarakat lain. Sebagai pelatih dalam hal ini adalah dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta terjadinya perubahan sikap dalam diri para penerima dana PNPM-MP Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, maka seorang pendamping juga harus mampu menjadi pelatih bagi kelompok masyarakat. Ketiga peran tersebut di atas sebenarnya bukan peran yang berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan, dimana satu dengan yang lain akan saling berkaitan dan mendukung.

Kegiatan pendampingan kelompok yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Tangen rata-rata per kelompok adalah setiap bulan (1) satu kali. Dari hasil pendampingan kelompok yang dilakukan oleh UPK menghasilkan beberapa perubahan menuju ke arah yang lebih baik, antara lain adanya

beberapa kelompok yang bersedia membayar angsurannya yang sudah beberapa bulan menunggak dan adanya perubahan perbaikan terhadap administrasi yang berada di tingkat kelompok.

Sampai dengan pelaksanaan Musrenbangkec Integrasi MAD Penetapan Usulan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 jumlah total tunggakan yang ada tinggal Rp 55.508.000,- yang kesemuanya berada di 16 kelompok di Desa Katelan.

Untuk mengatasi tunggakan yang terjadi di Desa Ketelan tersebut ada beberapa hal yang dilakukan UPK Kecamatan Tengen diantaranya adalah

1. UPK Kecamatan Tengen melakukan pendampingan dan pembinaan langsung kekelompok pada saat pertemuan kelompok.
2. UPK Kecamatan Tengen melakukan penagihan *door to door* kepada pemanfaat secara langsung, baik ketua kelompok maupun anggotanya, apabila saat penagihan tetap belum dapat membayar angsuran, maka para anggota diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar.
3. Tanggung renteng artinya anggota yang lancar membayar angsuran diberi tanggungan untuk membayar tunggakan anggota yang macet angsurannya, dengan dilakukan hal tersebut dapat meminimalkan tunggakan yang terjadi sehingga program PNPM-MP di Kecamatan Tengen dapat berjalan secara lancar.

Dalam pelaksanaan pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tengen Kabupaten Sragen, maka tim pendamping

mengimplementasikannya ke dalam beberapa tahap pendampingan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Fase Persiapan

Persiapan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok sasaran. Persiapan pendampingan, yang dilakukan oleh tim pendamping di Kabupaten Tangen adalah dari kabupaten yang dibantu oleh tim pendamping dari Kecamatan Tangen sendiri yang lebih menguasai permasalahan di wilayahnya. Langkah-langkah tim pendamping dalam masa atau tahap persiapan meliputi :

- a. Identifikasi lokasi di Kecamatan Tangen untuk mengetahui profil penerima dana PNPM-MP
 - b. Melakukan orientasi atau sosialisasi dan proses pemahaman kegiatan kepada kelompok sasaran yang akan dituju.
 - c. Identifikasi kebutuhan pendampingan atau fasilitasi (*need assessment*): bentuk atau jenis pendampingan atau fasilitasi.
 - d. Review atau analisis hasil *need assessment* (apa dan siapa melakukan kegiatan apa). Melakukan review mengenai identifikasi kebutuhan mana untuk mengetahui skala prioritas dalam pemberian PNPM- MP.
 - e. Penetapan arah program kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan pendampingan.
 - f. Merumuskan indikator keberhasilan pendampingan (partisipatif).
- Dalam hal ini tim pendamping membuat indikator ataupun kisi-kisi sejauhmana peran pendampingan tersebut dalam meningkatkan

commit to user

produktivitas dari penerima dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tangen.

- g. Penyusunan rencana program pelaksanaan. Tim pendamping menyusun rencana yang tepat untuk pendampingan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan pendampingan di tempat lain.
- h. Merancang proses pendampingan (jadwal, tempat, waktu, materi, pemeran).
- i. Pembekalan teknis kepada tim pelaku di setiap tingkatan (dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi) dimana bekerjasama dengan ketua-ketua unit yang berada di Kecamatan Tangen untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat.
- j. Penyusunan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tangen.

2. Fase Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya merealisasikan perencanaan yang telah dirumuskan oleh Tim pendamping PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen Sragen pada tahap persiapan. Kegiatan yang dilakukan oleh tim pendamping pada saat pelaksanaan adalah:

- a. Menyampaikan posisi dan perannya sebagai Fasilitator dalam masyarakat bahwa bagi masyarakat yang membutuhkan informasi guna kemajuan usahanya dapat berkonsultasi dengan tim pendamping.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan mekanisme penggalan gagasan bagi yang membutuhkan informasi demi kemajuan usaha dari penerima PNPM-MP Kecamatan Tangen.
- c. Memfasilitasi penentuan skala prioritas berdasarkan proposal masyarakat, mekanisme dan prosedur penyerapan dan pemanfaatan dana, mekanisme pelaksanaan kegiatan berdasarkan proposal yang disetujui.
- d. Memfasilitasi sistem evaluasi pelaksanaan kegiatan setelah dana PNPM -MP dikeluarkan untuk keperluan usaha dari penerima kredit tersebut.
- e. Menjaga proses (pengendalian) dan aturan main agar sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memantau alur pengembalian dari penerima PNPM -MP.
- f. Mencatat permasalahan, solusi, kekuatan dan kelemahan pada pelaksanaan PNPM-MP sebagai bahan evaluasi dari tim pendamping yang akan diserahkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di kabupaten.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama untuk mengukur tingkat pencapaian efektivitas penggunaan dan PNPM-MP Perdesaan Kecamatan Tangen pada penerimanya.

3. Pasca Pendampingan

Pada kegiatan pasca pendampingan maka hal-hal yang dilakukan oleh Tim Pendamping PNPM -MP Perdesaan Kecamatan Tangen Sragen adalah :

commit to user

- a. Menginformasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang terkait yakni tim melakukan laporan ke tingkat kabupaten mengenai keberhasilan usaha ataupun kegagalan usaha pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Tangen.
- b. Melakukan evaluasi kegiatan pendampingan terhadap pendayagunaan: sumberdaya, metode, teknik yang digunakan, dan kelompok sasaran (kemampuan dan kaderisasi) sebagai dasar program kebijakan pada tahap pendampingan yang lebih baik

Salah satu bentuk aktivitas dari tim pendamping PNPM- MP Kecamatan Tangen adalah bekerjasama dengan masyarakat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah di tingkat kelompok, dusun, desa dan antar desa atau kecamatan. Pertemuan-pertemuan masyarakat ini akan difasilitasi oleh fasilitator desa atau fasilitator kecamatan serta Pendamping Lokal.

I. Analisis Data

Untuk mengetahui dampak dari adanya program PNPM-MP terhadap peningkatan produksi, peningkatan tenaga kerja dan peningkatan penghasilan dengan menggunakan uji beda mean (uji Z) dan dalam penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon Test. Hasil uji beda mean dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Uji Beda Rata-rata Nilai Produksi Sebelum dan Sesudah Program PNPM - MP

a. Menentukan H_0 dan H_a

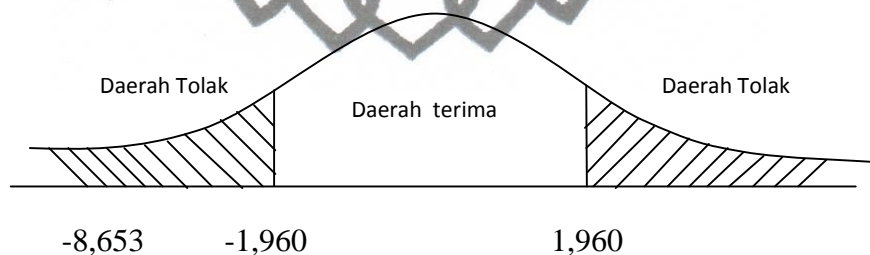
$H_0 : \mu_1 = 0$, Tidak ada perbedaan nilai produksi rata-rata sebelum dan sesudah program PNPM-MP

$H_a : \mu_1 \neq 0$, Ada perbedaan nilai produksi rata-rata sebelum dan sesudah program PNPM-MP

b. *Level of significance* yang digunakan (α) adalah 0,05 atau 5%

Dari tabel statistik dengan signifikansi 0,05 (uji 2 sisi) dan *degree of freedom* (df) $n-1$ atau $100-1 = 99$ maka diperoleh nilai Z_{tabel} sebesar 1,960. Sedangkan nilai Zhitung dapat dilihat dari output Wilcoxon sebagai hasil perhitungan SPSS yaitu sebesar -8,653.

c. Menentukan area penerimaan hipotesis



H_0 diterima bila $-1,960 \leq Z_{\text{hitung}} \leq 1,960$

H_0 ditolak bila $Z_{\text{hitung}} > 1,960$ atau $-Z_{\text{hitung}} < -1,960$

d. Kesimpulan

Berdasarkan pada nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai

$Z_{\text{hitung}} (-8,653) < -Z_{\text{tabel}} (-1,960)$ dan $Z_{\text{hitung}} (8,653) > Z_{\text{tabel}}$

(1,960) sehingga H_0 ditolak, dan diketahui bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_a diterima artinya ada perbedaan nilai produksi sebelum dan sesudah program PNPM-MP di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.

2. Uji Beda Rata-Rata Jumlah Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Program PNPM-MP

a. Menentukan H_0 dan H_a

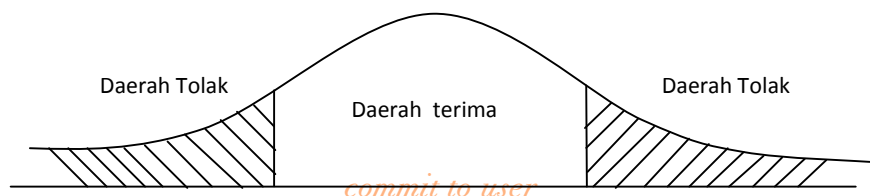
$H_0 : \mu_1 = 0$, Tidak ada perbedaan jumlah tenaga kerja rata-rata sebelum dan sesudah program PNPM-MP

$H_a : \mu_1 \neq 0$, Ada perbedaan jumlah tenaga kerja rata-rata sebelum dan sesudah program PNPM-MP

b. *Level of significance* yang digunakan (α) adalah 0,05 atau 5%

Dari tabel statistik dengan signifikansi 0,05 (uji 2 sisi) dan *degree of freedom* (df) $n-1$ atau $100-1 = 99$ maka diperoleh nilai Z_{tabel} sebesar 1,960. Sedangkan nilai Zhitung dapat dilihat dari output Wilcoxon sebagai hasil perhitungan SPSS yaitu sebesar -4,491

c. Menentukan area penerimaan hipotesis



$$-4,491 \quad -1,960 \quad 1,960$$

H_0 diterima bila $-1,960 \leq Z_{hitung} \leq 1,960$

H_0 ditolak bila $Z_{hitung} > 1,960$ atau $-Z_{hitung} < -1,960$

c. Kesimpulan

Berdasarkan pada nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai $Z_{hitung} (-4,491) < -Z_{tabel} (-1,960)$ dan $Z_{hitung} (4,491) > Z_{tabel} (1,960)$ sehingga H_0 ditolak, dan diketahui bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_a diterima artinya ada perbedaan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah program PNPM-MP di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.

3. Uji Beda Rata-Rata Penghasilan Sebelum dan Sesudah Program PNPM-MP

a. Menentukan H_0 dan H_a

$H_0 : \mu_1 = 0$, Tidak ada perbedaan penghasilan rata-rata sebelum dan sesudah program PNPM-MP

$H_a : \mu_1 \neq 0$, Ada perbedaan penghasilan rata-rata sebelum dan sesudah program PNPM-MP

b. *Level of significance* yang digunakan (α) adalah 0,05 atau 5%

Dari tabel statistik dengan signifikansi 0,05 (uji 2 sisi) dan *degree of freedom* (df) $n-1$ atau $100-1 = 99$ maka diperoleh nilai Z_{tabel} sebesar

1,960. Sedangkan nilai Zhitung dapat dilihat dari output Wilcoxon sebagai hasil perhitungan SPSS yaitu sebesar -8,434.

c. Menentukan area penerimaan hipotesis



H_0 diterima bila $-1,960 \leq Z_{hitung} \leq 1,960$

H_0 ditolak bila $Z_{hitung} > 1,960$ atau $-Z_{hitung} < -1,960$

d. Kesimpulan

Berdasarkan pada nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Zhitung $(-8,434) < -Z_{tabel} (-1,960)$ dan Zhitung $(8,434) > Z_{tabel} (1,960)$ sehingga H_0 ditolak, dan diketahui bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_a diterima artinya ada perbedaan penghasilan sebelum dan sesudah program PNPM-MP di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.

4. Perbedaan rata-rata nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan penghasilan setelah adanya program PNPM-MP di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata nilai produksi positif mean ranksnya adalah sebesar (50,00), nilai rata-rata jumlah tenaga kerja adalah (11,00) dan untuk penghasilan nilai positif mean ranknya adalah (50,26). Berdasarkan hal tersebut maka faktor penghasilan merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian anggota simpan pinjam usaha ekonomi produktif (UEP) di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.

J. Pembahasan

1. Hasil Temuan Pertama

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 7 desa dan diambil sebanyak 100 orang responden dengan pembagian di Desa Jekawal 14 orang (14%), Desa Galeh 19 orang (19%), Ngrombo 6 orang (6%) , Desa Denanyar 12 orang (12%), Desa Sigit 7 orang (7%) , Desa Dukuh 15 orang (15%), dan Katelan 27 orang (27%).
- b. Mayoritas responden yang memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen adalah perempuan yaitu 68 orang (68%).
- c. Mayoritas responden yang memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai umur antara 30 s/d 39 tahun yaitu sebanyak 35 orang (35%) sehingga merupakan usia produktif.
- d. Mayoritas responden yang memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan berpendidikan SMP yaitu sebanyak 48 orang (48%)

sehingga dengan tingkat pendidikan yang mayoritas pada tingkat SMP maka harapan terbesar adalah bekerja wiraswasta baik sebagai peternak, petani, perdagangan ataupun usaha perseorangan.

- e. Penerimaan manfaat PNPM Mandiri Perdesaan mayoritas responden mempunyai jenis usaha perdagangan dan pertanian.
- f. Mayoritas penerimaan manfaat dana PNPM Mandiri Perdesaan melakukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- yaitu sebanyak 53 orang (53%).
- g. Mayoritas penerimaan manfaat dana PNPM Mandiri Perdesaan lama usahanya adalah 5 tahun yaitu sebanyak 42 orang (42%) sehingga dalam hal ini responden sudah mempunyai pengalaman yang cukup dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
- h. Mayoritas penerima manfaat dana PNPM Mandiri Perdesaan melakukan pinjaman dengan jangka waktu angsuran 18 bulan yaitu sebanyak 55 orang (55%), dengan harapan dapat melakukan angsuran dengan nominal yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pengambilan jangka waktu 12 bulan ataupun 10 bulan.

2. Hasil Temuan Kedua

Bentuk aktivitas dari tim pendamping PNPM-MP Kecamatan Tangen adalah bekerjasama dengan masyarakat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah di tingkat kelompok, dusun, desa dan antar desa atau kecamatan. Pertemuan-pertemuan masyarakat difasilitasi oleh fasilitator desa atau fasilitator kecamatan serta Pendamping Lokal.

Kegiatan pendampingan kelompok yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Tangen rata-rata per kelompok adalah setiap bulan (1) satu kali. Dari hasil pendampingan kelompok tersebut beberapa perubahan menuju ke arah yang lebih baik, antara lain adanya beberapa kelompok yang bersedia membayar angsurannya yang sudah beberapa bulan menunggak dan adanya perubahan perbaikan terhadap administrasi yang berada di tingkat kelompok sehingga dapat mengatasi hambatan dari penerima manfaat dana PNPM-MP. UPK Kecamatan Tangen secara terus menerus melakukan penagihan dan pendampingan bagi kelompok-kelompok yang mengalami penunggakan angsuran. UPK melakukan penagihan *door to door* kepada pemanfaat secara langsung, baik ketua kelompok maupun anggotanya juga secara langsung.

Dalam kegiatan pendampingan UPK Kecamatan Tangen memerlukan tiga fase yaitu fase persiapan, fase pelaksanaan dan fase pasca pendampingan. Fase persiapan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok sasaran. Fase pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya merealisasikan perencanaan yang telah dirumuskan oleh Tim pendamping PNPM-MP di Kecamatan Tangen Sragen pada tahap persiapan. Pasca pendampingan adalah kegiatan evaluasi setelah pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan untuk mengetahui tolok ukur ataupun keberhasilan dari program pendampingan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Tangen.

3. Hasil Temuan Ketiga

commit to user

- a. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai produksi pada kelompok usaha UEP sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP, dengan produksi yang lebih tinggi dibanding sebelum adanya PNPM-MP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Zhitung (-8,653) dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$. Hal ini diperkuat dengan rata-rata nilai produksi yang mengalami peningkatan di mana dari rata-rata nilai produksi Rp145.390,- menjadi Rp166.150,- setelah mendapatkan PNPM-MP, sehingga menunjukkan bahwa nilai produksi penerimaan manfaat dana PNPM-MP di Kecamatan Tangen mengalami peningkatan, sehingga hipotesis terbukti kebenarannya.
- b. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan tenaga kerja pada kelompok usaha UEP sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP, dengan menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi dibanding sebelum adanya PNPM-MP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Zhitung (-4,491) dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$. Hal ini diperkuat dengan rata-rata tenaga kerja yang mengalami peningkatan di mana dari rata-rata 1,26 tenaga kerja menjadi 1,48 tenaga kerja, sehingga menunjukkan bahwa dengan penerimaan manfaat dana PNPM-MP di Kecamatan Tangen maka mampu menyerap tenaga kerja, sehingga hipotesis terbukti kebenarannya.
- c. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan penghasilan pada kelompok usaha UEP sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP, dengan penghasilan yang lebih tinggi dibanding sebelum adanya PNPM-MP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Zhitung (-8,434) dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$. Hal ini diperkuat dengan rata-rata

penghasilan responden yang mengalami peningkatan di mana dari rata-rata tenaga kerja Rp 1.633.350,- menjadi rata-rata Rp 2.368.275,- setelah mendapatkan PNPM-MP, sehingga menunjukkan bahwa dengan penerimaan manfaat dana PNPM- MP di Kecamatan Tangen maka dapat meningkatkan penghasilan anggota UEP, sehingga hipotesis terbukti kebenarannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

K. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

4. Profil Penerima Manfaat PNPM MP Kecamatan Tangen

Profil anggota penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tangen adalah pada 7 desa Desa Jekawal 14 orang (14%), Desa Galeh 19 orang (19%), Ngrombo 6 orang (6%) , Desa Denanyar 12 orang (12%), Desa Sigit 7 orang (7%) , Desa Dukuh 15 orang (15%), dan Katelan 27 orang (27%).

Mayoritas penerima manfaat PNPM MP d Desa Jekawal adalah di sektor Pertanian. Mayoritas penerima manfaat PNPM MP di Desa Galeh adalah di kelompok usaha perdagangan. Mayoritas penerima manfaat PNPM MP mandiri di Desa Ngrombo Sragen disector pertanian. Mayoritas penerima manfaat PNPM MP mandiri di Desa Denanyar Sragen di sektor pertanian dan sektor perdagangan. Mayoritas penerima manfaat PNPM MP di Desa Sigit Tangen Sragen di sektor pertanian. Mayoritas penerima manfaat PNPM MP mandiri di Desa Dukuh Tangen Sragen di sektor perdagangan dan sektor jasa. Mayoritas penerima manfaat PNPM MP di Desa Katelan Tangen Sragen di sektor perdagangan.

Mayoritas responden yang memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen adalah perempuan dengan umur antara 30 s/d 39 tahun, dengan tingkat pendidikan SMP yang digunakan untuk tambahan modal pada jenis mayoritas adalah usaha perdagangan dan pertanian. Mayoritas penerimaan manfaat dana PNPM Mandiri Perdesaan melakukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu angsuran 18 bulan.

5. Peran Pendampingan UPK Kecamatan Tangen Sragen

Aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Tangen Sragen adalah bekerjasama dengan masyarakat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah di tingkat kelompok, dusun, desa dan antar desa atau kecamatan. Kegiatan pendampingan kelompok yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Tangen rata-rata per kelompok adalah setiap bulan (1) satu kali. Dalam kegiatan pendampingan UPK Kecamatan Tangen memerlukan tiga fase yaitu fase persiapan, fase pelaksanaan dan fase pasca pendampingan. Fase persiapan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok sasaran. Fase pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya merealisasikan perencanaan yang telah dirumuskan oleh Tim pendamping PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen Sragen pada tahap persiapan. Pasca pendampingan adalah kegiatan evaluasi setelah pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan untuk mengetahui tolok ukur ataupun

keberhasilan dari program pendampingan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Tangen.

6. Uji Hipotesis

- a. Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen mempunyai dampak yang signifikan terhadap nilai produksi anggota UEP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ dimana rata-rata nilai produksi mengalami peningkatan dari Rp 145.390,- menjadi Rp166.150,- sehingga menunjukkan bahwa nilai produksi penerimaan manfaat dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen mengalami peningkatan.
- b. Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen mempunyai dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja anggota UEP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ dimana rata-rata tenaga kerja yang digunakan mengalami peningkatan dari rata-rata 1,26 tenaga kerja menjadi 1,48 tenaga kerja, sehingga menunjukkan bahwa dengan penerimaan manfaat dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen maka mampu menyerap tenaga kerja.
- c. Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tangen mempunyai dampak yang signifikan terhadap penghasilan anggota UEP. Hal ini ditunjukkan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$. di mana dari rata-rata penghasilan Rp 1.633.350,- menjadi rata-rata Rp 2.368.275,- setelah mendapatkan PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga menunjukkan bahwa dengan penerimaan manfaat dana PNPM Mandiri Perdesaan di

Kecamatan Tangen maka dapat meningkatkan penghasilan anggota UEP.

L. Saran

1. Bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tangen

- a. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan UPK terutama melalui kegiatan ekonomi produktif haruslah selalu diberikan pendampingan dan pemantauan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan agar dari kegiatan-kegiatan yang mendapat bantuan dapat dipertahankan. Pengelola UPK haruslah dapat memberikan pembinaan dan pendampingan, karena dengan pembinaan dan pendampingan maka usaha-usaha yang semula dibiayai oleh UPK dapat berkembang menjadi lebih besar. Sehingga tujuan UPK yang ingin memberdayakan masyarakat secara ekonomi dapat tercapai, karena UPK hanyalah program stimulan yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui bantuan modal usaha.
- b. Dalam setiap tahapan kegiatan sebaiknya keikutsertaan orang miskin diprioritaskan terutama dalam forum yang melibatkan warga antar desa.
- c. Meningkatkan atau memperbanyak bantuan pendidikan yang jumlahnya masih sangat terbatas.

2. Bagi Pemerintah

- a. Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) layak dipertahankan karena dalam pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, melalui pembangunan parasarana dan sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Pemerintah perlu melakukan mekanisme *reward and punishment*, yaitu pemberian penghargaan maupun hukuman bagi para pengguna manfaat PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Bagi Tim Pendamping

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Katelan terjadi tunggakan sebesar Rp 55.508.000 sehingga hal ini harus disikapi serius oleh tim pendamping, salah satu saran yang perlu dilakukan tim pendamping adalah melakukan perannya sebagai pendamping dalam hal konsultasi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya sampai dapat mengangsur jumlah pinjamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Tiza, 2010. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya.
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik dan Depsos, 2002, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, *Sragen Dalam Angka 2010*, Sragen: BPS
- Bappenas, 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta
- Budiono. 1992. *Ekonomi Moneter : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekanomi*. No.2, Yogyakarta : BPFE.
- Cox, David, 2004, “*Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region*” makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia,, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret
- Departemen Dalam Negeri, 2007, *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Jakarta : Tim Penyusun PNPM Mandiri
- Departemen Dalam Negeri, 2008, *PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Jakarta : Depdagri
- Erwin Permana, 2010. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoranmas Depok). *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

commit to user

- Hidayat, 2007, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Husein Umar, 2004, *Metode Riset Pemasaran Jasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Utama
- IAI ,2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Loekman Sutrisno.2003. *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan; dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Editor: Awan Setya Dewanta. Yogyakarta : Aditya Media.
- Mardi Yatmo Hutomo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Seminar Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta
- Otto Dwana Sagala, 2009. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap Pengembangan Sosio-Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samusir. *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Parikha. 2007. Studi Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007. *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Priyono dan Pranaka, 1996. *Pemberdayaan Mengandung Dua Kecenderungan*, Jakarta : Gramedia
- Ratih Twidaryati. 2010. Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Surakarta, Surakarta
- Riduwan. 2006. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta
- Sudarwan Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Suharto, dkk, 2004, *Dimensi Kemiskinan*, SMER

Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Warih Budiyono Setyawan. 2008. Evaluasi Proses Pelaksanaan program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Winardi. 1992. *Kamus Istilah Ekonomi-Inggris-Belanda-Indonesia*. Jakarta : PT Bina. Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lampiran 1**KUISIONER****A. IDENTITAS RESPONEN**

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Usia : _____
4. Pendidikan Terakhir : _____
5. Jenis Usaha : _____
6. Jumlah Pinjaman : _____
7. Lama usaha : _____
8. Jangka Waktu Angsuran : _____

B. USAHA SEBELUM PROGRAM PNPM

1. Nilai Produksi (Rp) : _____
2. Harga Jual : _____
3. Biaya Produksi : _____
 - a. Bahan Baku : _____
 - b. Tenaga Kerja : _____
 - c. Distribusi : _____
4. Jumlah Tenaga Kerja : _____
 - a. Full Time (8 jam) : _____
 - b. Part Time : _____
5. Penghasilan / bulan : _____

C. USAHA SETELAH PROGRAM PNPM

1. Nilai Produksi (Rp) : _____
2. Harga Jual : _____
3. Biaya Produksi : _____
 - a. Bahan Baku : _____
 - b. Tenaga Kerja : _____
 - c. Distribusi : _____
4. Jumlah Tenaga Kerja : _____
 - a. Full Time (8 jam) : _____
 - b. Part Time : _____
5. Penghasilan / bulan : _____

Lampiran 2

DATA RESPONDEN PEMANFAAT DAN JENIS USAHA PNPM MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN TANGEN TAHUN 2011

NO	NAMA LENGKAP	Tempat	JENIS KELAMIN	UMUR (TH)	Pendidikan Terakhir	JENIS USAHA	KETERAN GAN	Lama Usaha	Jangka Waktu Pinjaman
1	RASIDI	Jekawal	Laki-laki	45	SMA	Pertanian	Jagung	4	12
2	SWI HARTANTO	Jekawal	Laki-laki	25	SMP	Pertanian	Padi	5	18
3	SRI FATIMAH	Jekawal	Perempuan	22	SMP	Pertanian	Padi	5	18
4	MULYANI	Jekawal	Perempuan	28	SD	Pertanian	Padi	5	18
5	SUPRIHATIN	Jekawal	Perempuan	42	SD	Pertanian	Jagung	4	18
6	SUPIYATI	Jekawal	Perempuan	52	SMP	Pertanian	Padi	3	18
7	BAROKAH	Jekawal	Perempuan	28	SMP	Perdagangan	Dagang Bakso	4	12
8	SAMIYATI	Jekawal	Perempuan	45	SMP	Pertanian	Jagung	5	18
9	SULASTRI	Jekawal	Perempuan	34	SMP	Pertanian	Jagung	5	18
10	SUYATI	Jekawal	Perempuan	51	SMA	Jasa	Penjahit	4	18
11	KAMTI	Jekawal	Perempuan	42	SMP	Pertanian	Padi	4	18
12	PARIYATI PURNOMO	Jekawal	Perempuan	54	SMP	Pertanian	Padi	5	10
13	SRI WIDODO	Jekawal	Perempuan	51	SMA	Perdagangan	Gorengan	4	12
14	HARNI	Jekawal	Perempuan	33	SMP	Perdagangan	Toko Kelontong	3	12

15	PARNO	Galeh	Laki-laki	36	SMP	Pertanian	Padi	3	18
16	SUJARWO	Galeh	Laki-laki	41	SMP	Pertanian	Tebu	4	12
17	KRISNA BAYU	Galeh	Laki-laki	29	SMP	Perdagangan	Minyak tanah	5	12
18	SOLIKIN	Galeh	Laki-laki	27	SMP	Perdagangan	Minyak tanah	5	12
19	WAGIYO	Galeh	Laki-laki	30	SMP	Perdagangan	Minyak tanah	4	12
20	RAHAYU INDRI ASTUTI	Galeh	Perempuan	46	SMA	Jasa	Penjahit	3	18
21	SRI YATI	Galeh	Perempuan	49	SMA	Jasa	Transportasi	4	18
22	PARTONO	Galeh	Laki-laki	40	PT	Jasa	Transportasi	5	18
23	YUDI PRAMUKO	Galeh	Laki-laki	32	PT	Perdagangan	Air Mineral	5	18
24	SADIYO	Galeh	Laki-laki	39	SMA	Peternakan	Sapi	5	18
25	DARTI	Galeh	Perempuan	53	SMA	Pertanian	Tebu	4	18
26	SEKEN	Galeh	Laki-laki	50	SMA	Pertanian	Jagung	4	12
27	RUDI SANTOSO	Galeh	Laki-laki	26	SMP	Pertanian	Padi	5	12
28	JAYADI	Galeh	Laki-laki	45	SMP	Perdagangan	Mainan Anak	5	18
29	NGADIMAN	Galeh	Laki-laki	34	SD	Perdagangan	Pedagang Keliling	4	12
30	PRIYATUN	Galeh	Perempuan	31	SD	Perdagangan	Dagang Bakso	3	12
31	YAYUK DWI DASMIWATI	Galeh	Perempuan	32	SD	Pertanian	Jagung	4	12
32	DANANG SARWIJI	Galeh	Laki-laki	28	SMP	Pertanian	Padi	3	18
33	DAMI	Galeh	Perempuan	40	SMP	Pertanian	Jagung	5	10

34	DARISEM	Ngrombo	Perempuan	28	SMA	Pertanian	Padi	5	12
35	PARIYEM	Ngrombo	Perempuan	41	SMP	Pertanian	Jagung	5	10
36	SUWARNI	Ngrombo	Perempuan	38	SMP	Pertanian	Jagung	4	18
37	DIKEM	Ngrombo	Perempuan	51	SMP	Pertanian	Padi	5	10
38	K I N I	Ngrombo	Perempuan	41	SMA	Pertanian	Padi	4	10
39	SLAMET SRI RAHAYU	Ngrombo	Perempuan	43	SMA	Perdagangan	Toko Kelontong	4	18
40	SUMARNI	Denanyar	Perempuan	41	SMA	Perdagangan	Warung Nasi	5	18
41	SUKADI	Denanyar	Laki-laki	51	SMA	Pertanian	Padi	6	12
42	SURISNANI	Denanyar	Perempuan	39	SMA	Perdagangan	Toko kelontong	6	10
43	SITI HANDAYANI	Denanyar	Perempuan	41	SMEA	Pertanian	Padi	5	18
44	SRI HARTINI	Denanyar	Perempuan	35	SMP	Pertanian	Padi	4	18
45	SINEM	Denanyar	Perempuan	46	SMA	Pertanian	Padi	3	18
46	LASINEM	Denanyar	Perempuan	51	SMP	Pertanian	Jagung	4	18
47	PARYATUN	Denanyar	Perempuan	29	SD	Jasa	Foto Copy	5	12
48	GUTOMO	Denanyar	Laki-laki	35	SMP	Perdagangan	Pakaian keliling	4	12
49	SUKINI	Denanyar	Perempuan	44	SD	Perdagangan	Toko Kelontong	3	10
50	TRI YATMI	Denanyar	Perempuan	43	SMA	Perdagangan	Toko kelontong	4	12
51	JAMI	Denanyar	Perempuan	44	SMA	Pertanian	Padi	3	12
52	PARIYEM	Sigit	Perempuan	57	SMP	Pertanian	Jagung	6	18
53	SURAWAN	Sigit	Laki-laki	35	SMA	Pertanian	Jagung	7	12
54	LESTARI	Sigit	Perempuan	46	SMP	Jasa	Rias manten	6	12

55	SINEM	Sigit	Perempuan	51	SMP	Pertanian	Padi	5	18
56	S U M I	Sigit	Perempuan	30	SMP	Pertanian	Padi	5	18
57	SUKINI	Sigit	Perempuan	40	SMP	Pertanian	Padi	5	18
58	PARTI	Sigit	Perempuan	34	SMP	Perdagangan	Candak kulak	6	18
59	GINEM CIPTO HARTONO	Dukuh	Perempuan	61	SMP	Perdagangan	Toko Kelontong	6	12
60	TRI ASTUTI	Dukuh	Perempuan	22	SMA	Jasa	Penjahit	5	18
61	KARMI DIRO WIYONO	Dukuh	Perempuan	39	SMP	Pertanian	Palawija	6	18
62	SAMINEM	Dukuh	Perempuan	47	SD	Perdagangan	Toko Kelontong	6	18
63	MARJIYEM	Dukuh	Perempuan	36	SMA	Jasa	Penjahit	5	12
64	KOPSAH	Dukuh	Perempuan	46	STM	Jasa	Bengkel mobil	7	18
65	NGATIMAH	Dukuh	Perempuan	38	SMA	Perdagangan	Warung Makan	6	12
66	SUKINEM	Dukuh	Perempuan	57	SMA	Jasa	Kusen	5	12
67	SRI PURWANTINI	Dukuh	Perempuan	40	SMA	Perdagangan	Pedagang Keliling	5	18
68	RUSMIYATI	Dukuh	Perempuan	49	SMP	Perdagangan	Candak kulak	5	12
69	TITIK	Dukuh	Perempuan	27	SMP	Perdagangan	Warung Makan	4	18
70	SUPAMI	Dukuh	Perempuan	55	SMA	Pertanian	Padi	4	12
71	SUKIYEM	Dukuh	Perempuan	53	SMP	Pertanian	Jagung	5	18
72	SRI HARTATIK	Dukuh	Perempuan	36	SMA	Jasa	Catering	4	18
73	PARIYEM	Dukuh	Perempuan	60	SMP	Perdagangan	Toko	4	18

						gan	Kelontong		
74	PAIMAN	Katelan	Laki-laki	40	SMP	Pertanian	Tebu	4	18
75	SUNARTI	Katelan	Perempuan	34	SMP	Pertanian	Padi	4	12
76	J O N O	Katelan	Laki-laki	50	SMP	Pertanian	Padi	5	12
77	SUTONO	Katelan	Laki-laki	36	SMA	Perdagangan	Dagang Jamu	5	12
78	WINDARNI	Katelan	Perempuan	34	SMP	Peternakan	Lele	4	12
79	SUMIYATI	Katelan	Perempuan	61	SMA	Perdagangan	Candak Kulak	3	18
80	MURSITI	Katelan	Perempuan	37	SMP	Perdagangan	Buah	4	18
81	IDA PURWANI	Katelan	Perempuan	35	SMA	Perdagangan	Roti	5	18
82	HARTANTI	Katelan	Perempuan	31	SMP	Perdagangan	Buah	5	18
83	PARJIMAN	Katelan	Perempuan	40	SMP	Perdagangan	Pedagang Keliling	5	18
84	SUMINAH	Katelan	Perempuan	49	SMA	Perdagangan	Bahan Jamu	5	12
85	HAJI SUSILO	Katelan	Laki-laki	35	SMA	Jasa	Seni Musik	6	18
86	YULI SRI ASTUTI	Katelan	Perempuan	29	SMP	Perdagangan	Bahan Jamu	7	18
87	HERI SUTRISNO	Katelan	Laki-laki	36	SMA	Peternakan	Lele	4	12
88	JOKO SUROSO	Katelan	Laki-laki	35	STM	Jasa	Bengkel mobil	5	12
89	EKO PRIHANTORO	Katelan	Laki-laki	31	STM	Jasa	Bengkel	4	12

							mobil		
90	RADIMIN	Katelan	Laki-laki	55	SMA	Peternakan	Lele	5	18
91	SRI WAHYUNINGSIH	Katelan	Perempuan	28	SMP	Perdagangan	Pakaian jadi	6	12
92	MUHAMMAD ZAMZURI	Katelan	Laki-laki	31	SMA	Perdagangan	Susu Kedelai	5	18
93	SAGI GITO SUDARMO	Katelan	Laki-laki	55	SMP	Pertanian	Padi	5	18
94	HARTONO	Katelan	Laki-laki	34	SMA	Pertanian	Padi	4	18
95	SUGINI	Katelan	Perempuan	34	SD	Perdagangan	TokoKelontong	5	18
96	TRI HARYANTI	Katelan	Perempuan	38	SMP	Petanian	Tebu	4	18
97	SYAKHRONI	Katelan	Laki-laki	46	SD	Perdagangan	Warung Mie Ayam	5	12
98	MA'ARIF AL HUDRI	Katelan	Laki-laki	30	SMP	Pertanian	Jagung	6	12
99	PARJAN	Katelan	Laki-laki	45	SMA	Pertanian	Jagung	6	18
00	HASTUTI HANDAYANI	Katelan	Perempuan	44	SMA	Perdagangan	Toko Kelontong	5	18

LAMPIRAN 3**DATA SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA PNPM MANDIRI PERDESAAN**

NO	JUMLAH PINJAMAN	Nilai Produksi		Tenaga Kerja		Penghasilan	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum PNPM	Sesudah PNPM
1	Rp 3.000.000,00	Rp 120.000,00	Rp 150.000,00	1	1	Rp 1.300.000,00	Rp 1.500.000,00
2	Rp 5.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 320.000,00	1	1	Rp 1.700.000,00	Rp 2.100.000,00
3	Rp 5.000.000,00	Rp 120.000,00	Rp 140.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 1.900.000,00
4	Rp 5.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 350.000,00	1	1	Rp 2.700.000,00	Rp 3.700.000,00
5	Rp 5.000.000,00	Rp 80.000,00	Rp 100.000,00	1	2	Rp 2.000.000,00	Rp 2.600.000,00
6	Rp 5.000.000,00	Rp 120.000,00	Rp 140.000,00	1	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.400.000,00
7	Rp 5.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 300.000,00	1	1	Rp 1.950.000,00	Rp 2.670.000,00
8	Rp 5.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 170.000,00	1	1	Rp 1.800.000,00	Rp 2.300.000,00
9	Rp 5.000.000,00	Rp 125.000,00	Rp 140.000,00	1	1	Rp 1.300.000,00	Rp 1.700.000,00
10	Rp 5.000.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	1	2	Rp 2.400.000,00	Rp 3.000.000,00
11	Rp 5.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.750.000,00
12	Rp 2.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 230.000,00	1	2	Rp 750.000,00	Rp 1.000.000,00
13	Rp 2.000.000,00	Rp 35.000,00	Rp 50.000,00	1	1	Rp 1.350.000,00	Rp 1.575.000,00
14	Rp 3.000.000,00	Rp 50.000,00	Rp 65.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.900.000,00
15	Rp 3.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 175.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 2.100.000,00
16	Rp 3.000.000,00	Rp 50.000,00	Rp 70.000,00	1	1	Rp 1.700.000,00	Rp 2.300.000,00
17	Rp 3.000.000,00	Rp 80.000,00	Rp 90.000,00	1	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.300.000,00
18	Rp 3.000.000,00	Rp 100.000,00	Rp 130.000,00	1	1	Rp 1.100.000,00	Rp 1.500.000,00
19	Rp 3.000.000,00	Rp 100.000,00	Rp 120.000,00	1	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.500.000,00
20	Rp 5.000.000,00	Rp 80.000,00	Rp 100.000,00	2	3	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00

21	Rp 5.000.000,00	Rp 175.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 2.100.000,00	Rp 3.500.000,00
22	Rp 5.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 260.000,00	1	1	Rp 2.500.000,00	Rp 4.000.000,00
23	Rp 5.000.000,00	Rp 80.000,00	Rp 100.000,00	2	2	Rp 2.000.000,00	Rp 2.500.000,00
24	Rp 5.000.000,00	Rp 249.000,00	Rp 250.000,00	1	1	Rp 1.900.000,00	Rp 2.600.000,00
25	Rp 5.000.000,00	Rp 80.000,00	Rp 100.000,00	1	1	Rp 2.000.000,00	Rp 3.210.000,00
26	Rp 5.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 2.500.000,00
27	Rp 5.000.000,00	Rp 125.000,00	Rp 150.000,00	1	1	Rp 1.800.000,00	Rp 2.500.000,00
28	Rp 5.000.000,00	Rp 100.000,00	Rp 120.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 2.000.000,00
29	Rp 3.000.000,00	Rp 60.000,00	Rp 75.000,00	1	1	Rp 900.000,00	Rp 1.500.000,00
30	Rp 3.000.000,00	Rp 125.000,00	Rp 130.000,00	1	1	Rp 900.000,00	Rp 2.400.000,00
31	Rp 5.000.000,00	Rp 80.000,00	Rp 100.000,00	1	2	Rp 2.000.000,00	Rp 2.600.000,00
32	Rp 1.000.000,00	Rp 35.000,00	Rp 50.000,00	1	1	Rp 1.350.000,00	Rp 1.575.000,00
33	Rp 3.000.000,00	Rp 100.000,00	Rp 120.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 1.800.000,00
34	Rp 2.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 175.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	
35	Rp 5.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 2.500.000,00
36	Rp 1.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 175.000,00	1	1	Rp 700.000,00	Rp 1.000.000,00
37	Rp 2.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 160.000,00	1	1	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00
38	Rp 5.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 350.000,00	1	1	Rp 2.700.000,00	Rp 3.700.000,00
39	Rp 5.000.000,00	Rp 65.000,00	Rp 75.000,00	1	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.400.000,00
40	Rp 1.500.000,00	Rp 100.000,00	Rp 110.000,00	2	2	Rp 800.000,00	Rp 1.100.000,00
41	Rp 1.000.000,00	Rp 90.000,00	Rp 95.000,00	1	1	Rp 600.000,00	Rp 900.000,00
42	Rp 5.000.000,00	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 2.000.000,00
43	Rp 5.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	1	1	Rp 2.250.000,00	Rp 2.700.000,00
44	Rp 5.000.000,00	Rp 120.000,00	Rp 135.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 2.000.000,00
45	Rp 5.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 275.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 2.000.000,00
46	Rp 3.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 275.000,00	1	1	Rp 1.000.000,00	Rp 14.000.000,00
47	Rp 2.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 220.000,00	1	2	Rp 1.000.000,00	Rp 1.300.000,00

48	Rp 1.000.000,00	Rp 75.000,00	Rp 90.000,00	1	1	Rp 810.000,00	Rp 1.260.000,00
49	Rp 3.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 1.250.000,00	Rp 1.750.000,00
50	Rp 3.000.000,00	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.900.000,00
51	Rp 5.000.000,00	Rp 120.000,00	Rp 130.000,00	1	1	Rp 2.300.000,00	Rp 2.800.000,00
52	Rp 3.000.000,00	Rp 190.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 1.700.000,00
53	Rp 3.000.000,00	Rp 100.000,00	Rp 130.000,00	1	1	Rp 1.600.000,00	Rp 1.800.000,00
54	Rp 5.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 170.000,00	3	3	Rp 3.000.000,00	Rp 4.000.000,00
55	Rp 5.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 170.000,00	1	1	Rp 2.300.000,00	Rp 2.700.000,00
56	Rp 5.000.000,00	Rp 100.000,00	Rp 120.000,00	1	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.400.000,00
57	Rp 5.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 230.000,00	1	1	Rp 1.800.000,00	Rp 2.100.000,00
58	Rp 3.000.000,00	Rp 65.000,00	Rp 75.000,00	1	1	Rp 1.000.000,00	Rp 150.000,00
59	Rp 5.000.000,00	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 2.000.000,00
60	Rp 5.000.000,00	Rp 100.000,00	Rp 120.000,00	2	3	Rp 1.700.000,00	Rp 2.500.000,00
61	Rp 5.000.000,00	Rp 125.000,00	Rp 150.000,00	1	1	Rp 2.300.000,00	Rp 3.400.000,00
62	Rp 5.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 1.250.000,00	Rp 1.750.000,00
63	Rp 5.000.000,00	Rp 120.000,00	Rp 125.000,00	1	2	Rp 2.500.000,00	Rp 3.500.000,00
64	Rp 5.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 350.000,00	3	3	Rp 2.200.000,00	Rp 3.200.000,00
65	Rp 5.000.000,00	Rp 70.000,00	Rp 100.000,00	3	3	Rp 1.900.000,00	Rp 2.800.000,00
66	Rp 5.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00	2	3	Rp 2.000.000,00	Rp 2.900.000,00
67	Rp 5.000.000,00	Rp 70.000,00	Rp 80.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00
68	Rp 5.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00	1	1	Rp 2.750.000,00	Rp 3.600.000,00
69	Rp 4.000.000,00	Rp 80.000,00	Rp 100.000,00	2	3	Rp 1.900.000,00	Rp 3.100.000,00
70	Rp 4.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 1.800.000,00	Rp 2.700.000,00
71	Rp 4.000.000,00	Rp 180.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 2.100.000,00	Rp 3.300.000,00
72	Rp 5.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	2	2	Rp 3.000.000,00	Rp 4.000.000,00
73	Rp 2.000.000,00	Rp 120.000,00	Rp 150.000,00	1	1	Rp 900.000,00	Rp 1.500.000,00
74	Rp 2.000.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.750.000,00

75	Rp 2.000.000,00	Rp 125.000,00	Rp 150.000,00	1	1	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00
76	Rp 2.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 280.000,00	1	1	Rp 1.250.000,00	Rp 1.500.000,00
77	Rp 2.000.000,00	Rp 30.000,00	Rp 40.000,00	1	1	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00
78	Rp 5.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 275.000,00	1	2	Rp 2.100.000,00	Rp 2.500.000,00
79	Rp 5.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00	1	1	Rp 2.750.000,00	Rp 3.600.000,00
80	Rp 4.000.000,00	Rp 240.000,00	Rp 250.000,00	1	1	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00
81	Rp 5.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.700.000,00
82	Rp 5.000.000,00	Rp 70.000,00	Rp 90.000,00	1	1	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00
83	Rp 2.000.000,00	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	1	1	Rp 900.000,00	Rp 1.100.000,00
84	Rp 4.000.000,00	Rp 60.000,00	Rp 80.000,00	1	2	Rp 1.700.000,00	Rp 2.100.000,00
85	Rp 4.000.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	1	1	Rp 1.600.000,00	Rp 2.000.000,00
86	Rp 2.000.000,00	Rp 70.000,00	Rp 90.000,00	1	2	Rp 1.500.000,00	Rp 2.000.000,00
87	Rp 3.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 180.000,00	2	3	Rp 3.000.000,00	Rp 4.500.000,00
88	Rp 3.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	2	3	Rp 3.500.000,00	Rp 4.200.000,00
89	Rp 3.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	4	5	Rp 2.700.000,00	Rp 3.900.000,00
90	Rp 3.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	2	3	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00
91	Rp 5.000.000,00	Rp 125.000,00	Rp 150.000,00	3	5	Rp 2.400.000,00	Rp 3.200.000,00
92	Rp 5.000.000,00	Rp 75.000,00	Rp 80.000,00	2	2	Rp 1.200.000,00	Rp 2.400.000,00
93	Rp 5.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00	2	2	Rp 2.000.000,00	Rp 2.700.000,00
94	Rp 5.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 180.000,00	2	2	Rp 2.100.000,00	Rp 3.700.000,00
95	Rp 4.000.000,00	Rp 135.000,00	Rp 150.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.900.000,00
96	Rp 2.000.000,00	Rp 90.000,00	Rp 100.000,00	1	1	Rp 750.000,00	Rp 1.200.000,00
97	Rp 2.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 280.000,00	1	2	Rp 1.250.000,00	Rp 1.650.000,00
98	Rp 2.000.000,00	Rp 180.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 2.100.000,00	Rp 3.300.000,00
99	Rp 5.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	1	1	Rp 1.400.000,00	Rp 2.500.000,00
100	Rp 5.000.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	1	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.900.000,00

Lampiran 4

Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	32	32.0	32.0	32.0
	Perempuan	68	68.0	68.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 30 tahun	14	14.0	14.0	14.0
	30 - 39 tahun	35	35.0	35.0	49.0
	40 - 49 tahun	30	30.0	30.0	79.0
	50 tahun ke atas	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	10	10.0	10.0	10.0
	SMP	48	48.0	48.0	58.0
	SMA/STM	40	40.0	40.0	98.0
	PT	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Peternakan	4	4.0	4.0	4.0
	Perdagangan	39	39.0	39.0	43.0
	Pertanian	39	39.0	39.0	82.0
	Usaha perserorangan/jasa	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Jumlah Pinjaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1000000.00	4	4.0	4.0	4.0
	1500000.00	1	1.0	1.0	5.0
	2000000.00	15	15.0	15.0	20.0
	3000000.00	20	20.0	20.0	40.0
	4000000.00	7	7.0	7.0	47.0
	5000000.00	53	53.0	53.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lama usaha/th

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	10	10.0	10.0	10.0
	4.00	32	32.0	32.0	42.0
	5.00	42	42.0	42.0	84.0
	6.00	13	13.0	13.0	97.0
	7.00	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 5

Distribusi Frekuensi Nilai Produksi

Statistics

		Sebelum	Sesudah
N	Valid	100	100
	Missing	0	0
Mean		145390.0	166150.0
Median		125000.0	150000.0
Std. Deviation		83471.15	87780.88
Sum		1.5E+07	1.7E+07

Distribusi Frekuensi Tenaga Kerja

Statistics

		Sebelum	Sesudah
N	Valid	100	100
	Missing	0	0
Mean		1.2600	1.4800
Median		1.0000	1.0000
Std. Deviation		.57945	.84662
Sum		126.00	148.00

Distribusi Frekuensi Penghasilan

Statistics

		Sebelum	Sesudah
N	Valid	100	100
	Missing	0	0
Mean		1633350	2368275
Median		1500000	2200000
Std. Deviation		596081.5	1461259
Sum		1.6E+08	2.4E+08

Lampiran 6

Hasil Uji Beda Mean Nilai Produksi Sebelum dan Sesudah PNPM

NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Sebelum	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	99 ^b	50.00	4950.00
	Ties	1 ^c		
	Total	100		

a. Sesudah < Sebelum

b. Sesudah > Sebelum

c. Sesudah = Sebelum

Test Statistics^b

	Sesudah - Sebelum
Z	-8.653 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test



Hasil Uji Beda Mean Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah PNPM

NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Sebelum	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	21 ^b	11.00	231.00
	Ties	79 ^c		
	Total	100		

a. Sesudah < Sebelum

b. Sesudah > Sebelum

c. Sesudah = Sebelum

Test Statistics^b

	Sesudah - Sebelum
Z	-4.491 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Hasil Uji Beda Mean Penghasilan Sebelum dan Sesudah PNPM**NPar Tests****Wilcoxon Signed Ranks Test****Ranks**

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Sebelum Negative Ranks	1 ^a	74.50	74.50
Positive Ranks	99 ^b	50.26	4975.50
Ties	0 ^c		
Total	100		

a. Sesudah < Sebelum

b. Sesudah > Sebelum

c. Sesudah = Sebelum

Test Statistics^b

	Sesudah - Sebelum
Z	-8.434 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test